

**PERANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEGIATAN PERIKANAN
MASYARAKAT NELAYAN PESISIR UTARA BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan
Pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh:

**MAJID APRIADI
NIM. 0410840040**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
MALANG
2010**

**PERANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEGIATAN PERIKANAN
MASYARAKAT NELAYAN PESISIR UTARA BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perikanan Pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas
Brawijaya**

Oleh:
MAJID APRIADI
NIM. 0410840040

Menyetujui,

Dosen Penguji I

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS)
NIP. 19630820 198802 1 001
TANGGAL :

(Ir. ISMADI, MS)
NIP. 19490515 197802 1 001
TANGGAL :

Dosen Penguji II

Dosen Pembimbing II

(Dr.Ir. NUDDIN HARAHAH, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
TANGGAL :

(Dr.Ir. HARSUKO RINIWATI, MP)
NIP. 19660604 1990031 2 002
TANGGAL :

Mengetahui,
Ketua jurusan SEPK

(Dr.Ir. NUDDIN HARAHAH, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
TANGGAL :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
Jl. Raya No. 17 Brondong Telp. / Fax/ (0322) 663105 - Lamongan - 62263
JAWA TIMUR

SURAT KETERANGAN
Nomor : *548* /PPNBr.A/TU.210/V/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Sutisna, A.Pi
NIP : 19610724 198603 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK. I / (IV/b))
Jabatan : Kepala Pelabuhan

Menerangkan bahwa :

Nama : Majid Apriadi
NIM : 0410840040
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya malang.
Judul : Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dalam Mendukung Pengembangan Kegiatan Perikanan Masyarakat Nelayan Pesisir Utara Desa Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Telah mengadakan Penelitian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mulai tanggal 10 April sampai dengan 27 Mei 2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **BRONDONG**
Pada Tanggal : *31* Mei 2010

Kepala
Dedi Sutisna, A. Pi
NIP. 19610724 198603 1 002

RINGKASAN

MAJID APRIADI, Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Dalam Mendukung Pengembangan Kegiatan Perikanan Masyarakat Nelayan Pesisir Utara Brondong Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. (Di bawah bimbingan **Ir. Ismadi, MS** dan **Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP.**)

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Lokasi tersebut di pilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu tempat utama jalur pemasaran ikan di Jawa Timur, dan lokasi yang berada di jalur pantura pulau Jawa sehingga sangat menarik untuk di kaji permasalahan yang ada di dalamnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, 2) Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam pengembangan kegiatan perikanan masyarakat nelayan di desa Brondong, 3) Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap pembangunan perikanan di kabupaten Lamongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dengan teknik yang digunakan adalah studi kasus. Analisa data yang digunakan adalah Analisis terhadap fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Deskriptif. Kemudian untuk menganalisa kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menggunakan pendekatan Indeks Produksi relatif, dan analisis Location quotient.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terletak di Kelurahan Brondong yang merupakan Ibu kota dari Kecamatan Brondong yang berjarak sekitar 50 km di sebelah utara pusat kota Lamongan dan berjarak sekitar 27 km sebelah timur kota Tuban. Dari kota Lamongan di perlukan waktu sekitar 1 jam atau tepatnya berada pada posisi 6° sampai 7° lintang selatan dan 123° bujur timur.

Letak Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang sangat strategis diharapkan kapal-kapal dapat mendaratkan hasil tangkapannya karena aksesibilitas transportasi darat relative dekat dengan Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Kemudahan dan pelayanan jasa yang diberikan oleh pelabuhan dapat memacu meningkatnya frekwensi kapal yang akan mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dilihat dari implementasi fungsi pelabuhan perikanan yaitu telah dioperasikankannya seluruh sumberdaya yang ada. Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong adalah:

- a) Tempat tambat labuh kapal perikanan
- b) Tempat pendaratan ikan
- c) Tempat pemasaran dan distribusi ikan
- d) Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- e) Tempat pengumpulan data tangkapan
- f) Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- g) Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan
- h) Pusat pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan.

Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat dengan pendekatan Nilai Indeks Relatif PPN Brondong selama kurun waktu 2005-2009. Berdasarkan hasil olahan data dapat diketahui bahwa rata-rata indeks relatif produksi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah 1,02

dengan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,0275 % sehingga dapat di simpulkan secara umum kualitas pemasaran hasil perikanan khususnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif baik dan secara umum di Kabupaten Lamongan juga baik. Dari hasil analisa indeks relatif diatas juga dapat di simpulkan bahwa kualitas pemasaran hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif lebih baik dari kualitas pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Lamongan yang secara otomatis akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di sekitar pelabuhan juga meningkat.

Nilai LQ dari Sektor Perikanan Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 2005 – 2009 adalah 3,71 sehingga dapat di simpulkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan basis ekonomi masyarakat. Sehingga pengembangan sector perikanan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah Kabupaten Lamongan. Salah satu dari pusat kegiatan ekonomi perikanan Kabupaten Lamongan berada di PPN Brondong yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap produksi perikanan Kabupaten Lamongan khususnya produksi perikanan tangkap.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan laporan skripsi yang berjudul: *“Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Dalam Mendukung Pengembangan Kegiatan Perikanan Masyarakat Nelayan Pesisir Utara Brondong Kabupaten Lamongan, Jawa Timur”*.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Pada laporan skripsi ini disajikan pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan bagaimana peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Perikanan Brondong dalam mendukung pengembangan kegiatan masyarakat nelayan yang ada di pesisir utara Brondong.

Adapun bahasan-bahasan yang terdapat dalam laporan meliputi profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Peranan terhadap usaha pengembangan kegiatan masyarakat nelayan, dan kontribusi terhadap pembangunan perikanan di Kabupaten Lamongan.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan kemampuan untuk lebih teliti dan detail, tetapi dirasakan masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2010

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah dan anugerah-Nya hingga bisa terselesaikannya laporan ini dengan baik. Harapan yang sangat besar ditumpukan pada hasil yang dicapai dalam laporan ini hingga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Ucapan terima kasih dan hasil ini saya persembahkan kepada Bpk. Ir. Ismadi, MS dan Ibu Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP atas bimbingan, perhatian, kesabaran dan waktu yang telah diluangkan dari mulai penyusunan sampai terselesaikannya laporan ini. Terima kasih juga saya persembahkan kepada Bpk. Dr.Ir. Agus Tjahjono, Ms dan Bpk. Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP karena telah bersedia menjadi penguji dan memberikan masukan-masukan demi kelengkapan laporan ini. Ucapan terima kasih juga saya persembahkan kepada Bpk. Dedi Sutisna, A.Pi, selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian di PPN Brondong, dan Bpk. Amik Amiyoso, A.Pi. M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan yang telah memberikan informasi kondisi perikanan di kawasan PPN Brondong, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Lamongan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya persembahkan buat kedua orang tua yang selalu memberi dukungan, do'a, cinta dan kasihnya yang tak pernah habis dan pudar walaupun mungkin anaknya ini selalu berbuat salah. Buat my Schatzi 'n Una "Ich Liebe Dich Forthwährend". Buat my brotherhood Gamboeta 'N my company Gamboeta Metro Persada yang selalu ada baik dalam suka dan duka (tetap melangkah untuk yang mencapai titik tertinggi), buat all sosexer's tetap smangat. Thank's for all.....!!!!!!!

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pembangunan Pelabuhan Di Indonesia	6
2.1.2 Definisi dan Profil Pelabuhan Perikanan	8
2.1.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan	9
2.1.4 Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan	12
2.1.4.1 Peran Pelabuhan Perikanan	12
2.1.4.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan	12
2.1.5 Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Pembangunan Daerah	13
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.2.1 Pelabuhan Perikanan	15
2.2.2 Peran Pelabuhan Perikanan	16
2.2.3 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perikanan	17
2.3 Kerangka Berpikir	18
3. METODE PENELITIAN	20
3.1 Waktu dan tempat Penelitian	20
3.2 Jenis Penelitian	20
3.3 Jenis Dan Sumber Data	21
3.3.1 Data Primer	21
3.3.2 Data Sekunder	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Metode Pengambilan Sampel	25
3.6 Analisa Data	27
4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
4.1 Keadaan Geografis	31
4.2 Demografi	31

4.3 Musim	32
4.4 Keadaan Usaha Perikanan	33
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Serta Kegiatan Perikanan Yang Ada	37
5.1.1 Tugas dan Fungsi PPN Brondong	38
5.1.2 Visi dan Misi PPN Brondong	39
5.1.3 Tujuan Sasaran PPN Brondong	40
5.1.4 Struktur Organisasi PPN Brondong	41
5.1.5 Kelembagaan Yang Terkait Dengan Pengelolaan PPN Brondong	43
5.2 Peranan PPN Brondong Dalam Pengembangan Kegiatan Perikanan Masyarakat Nelayan di Desa Brondong	48
5.2.1 Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana	63
5.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja	67
5.3 Kontribusi PPN Brondong Terhadap Pembangunan Perikanan di Kabupaten Lamongan	70
5.3.1 Pendapatan Masyarakat Nelayan	71
5.3.2 Pendapatan PPN Brondong	74
5.3.3 Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah	76
6. KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

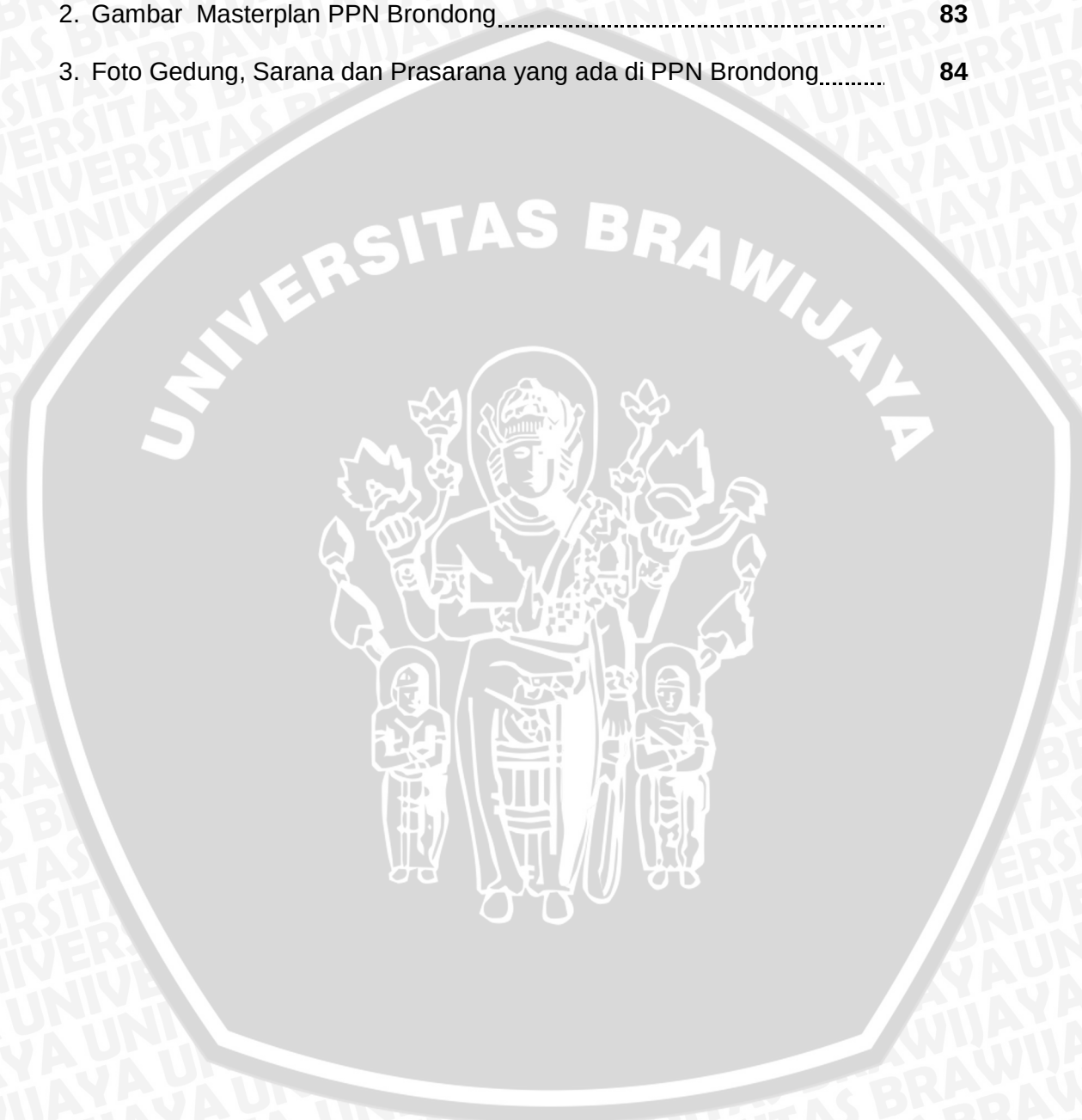
Tabel	Halaman
1. Data penduduk Kecamatan Brondong menurut mata pencaharian tahun 2009.....	32
2. Jumlah Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap di PPN Brondong Tahun 2009.....	34
3. Jenis Usaha Budidaya di Kabupaten Lamongan.....	35
4. Rata-Rata Kunjungan Kapal Per Alat Tangkap Tahun 2009.....	50
5. Jumlah Kunjungan Kapal Peralat Tangkap Di PPN Brondong Tahun 2009.....	50
6. Jenis dan Jumlah Ikan yang didaratkan di PPN Brondong Tahun 2009.....	53
7. Produksi Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan PPN Brondong Tahun 2009.....	57
8. Penyaluran Logistik Kapal Per Trip.....	62
9. Fasilitas pokok yang terdapat pada PPN Brondong.....	64
10. Fasilitas Fungsional yang terdapat pada PPN.....	65
11. Fasilitas penunjang yang terdapat pada PPN Brondong.....	66
12. Jenis Pekerjaan yang ada di PPN Brondong.....	67
13. Kondisi Indeks Relatif Nilai Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Lamongan 2005-2009.....	71
14. Pendapatan Nelayan Juragan di PPN Brondong 2009.....	72
15. Pendapatan Pandega di PPN Brondong tahun 2009.....	73
16. Pendapatan PPN Brondong Tahun 2009 dari Sektor Non Pajak.....	75
17. Analisis Location Quotion (LQ) dengan indikator PDRB harga berlaku (dalam miliar rupiah).....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir Penelitian.....	19
2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.....	42
3. Kapal Yang Berlabuh Di Pelabuhan Brondong.....	51
4. Dermaga Pelabuhan Brondong.....	52
5. Proses Pendaratan Ikan.....	54
6. Aktivitas Di TPI Brondong.....	55
7. Alur Proses Distribusi Ikan di PPN Brondong.....	56
8. Persiapan Pemasaran Ke Luar Kota.....	56
9. Pertemuan Antara Nelayan Dengan Stake Holder di Balai Pertemuan Nelayan (BPN) PPN Brondong.....	60
10. Bengkael Yang Ada Di PPN Brondong.....	61
11. Pabrik Es Untuk Memenuhi Kebutuhan Nelayan.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.....	82
2. Gambar Masterplan PPN Brondong.....	83
3. Foto Gedung, Sarana dan Prasarana yang ada di PPN Brondong.....	84



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan garis pantai yang terpanjang di dunia, memiliki laut yang sangat luas sehingga perikanan merupakan sektor yang sangat penting untuk dikembangkan. Sesuai dengan fenomena diatas maka sangat wajar apabila sebagian penduduknya bermatapencaharian dibidang perikanan dan diantaranya adalah sebagai nelayan.

Pemerataan pembangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia sudah lama dinantikan serta diinginkan oleh rakyat Indonesia. Harapan dan cita-cita yang ingin dijadikan kenyataan tersebut dapat diimplementasikan melalui pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Dasar 45 (Dahuri, 2002).

Pemerintah selalu mengarahkan program-program pembangunan pelabuhan perikanan menjadi pusat industri perikanan dari hulu hingga hilir serta sebagai pusat pembinaan nelayan kecil, selain itu juga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perikanan dimana industri dan jasa-jasa usaha perikanan ada di pelabuhan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama nelayan kecil (Anonymous, 2004).

Menurut Murdiyanto (2004), Salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah penyediaan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai. Prasarana pelabuhan yang ada dan akan

dibangun merupakan basis kegiatan produksi perikanan dan menjadi pusat komunikasi antara kegiatan di wilayah laut dan daratan.

Berdasarkan UU No 9 tahun 1985 pada pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Pemerintah sejak Pelita II telah membangun pelabuhan perikanan sampai sekarang berjumlah 594 buah pelabuhan perikanan yang terdiri dari 33 buah pelabuhan perikanan dan 561 buah pangkalan pendaratan ikan, dalam hal ini termasuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Mahyudin, 2001).

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diperlukan dalam pengembangan perikanan tangkap karena dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi kapal penangkap ikan untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan laut. Bagi kapal-kapal perikanan diperlukan tempat yang “aman” untuk berlabuh guna mendaratkan ikan hasil tangkapan dan melakukan kegiatan persiapan untuk kembali melakukan penangkapan ikan dilaut (Dirjen Perikanan Tangkap, 2008).

Operasional Pelabuhan Perikanan secara sederhana adalah suatu pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan untuk mendorong terselenggaranya kegiatan produksi dan jasa dibidang usaha perikanan. Tingkat operasional ditentukan dari tingkat keuntungan ekonomis yang diperoleh pelabuhan perikanan sebagai basis usaha berdasarkan indikator umum operasional, yaitu pendaratan ikan, kunjungan kapal, penyaluran perbekalan kapal dan penyerapan tenaga kerja (Kalolo, 1996).

Sebagai sebuah infrastruktur pembangunan ekonomi, pelabuhan memiliki peranan penting sebagai penggerak roda ekonomi suatu kawasan. Dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan laut merupakan bagian yang tidak

terpisahkan. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan yang digolongkan baik harus memenuhi syarat 3C yaitu *comprehensive*, *coordinated*, dan *continuing* (Fauzi A, 2005). Selanjutnya dikatakan pula bahwa fungsi pelabuhan laut yang komprehensif akan menunjang aktivitas ekonomi kelautan lainnya, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi sehingga menyebabkan pelabuhan lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Pelabuhan laut yang terkoordinasi dengan baik juga akan memberikan fungsi pelayanan yang optimal sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap jasa pelabuhan itu sendiri di masa mendatang. Yang bahkan lebih penting adalah karena pelabuhan memberikan jasa yang bersifat dinamis, maka kontinuitas pelayanan menjadi kunci utama pergerakan aktivitas ekonomi baik di kawasan pelabuhan itu sendiri maupun di wilayah sekitarnya. Fungsi ekonomi pelabuhan laut juga tidak terbatas pada wilayah pantai dan laut, tetapi juga pada skala regional secara menyeluruh baik pada tingkat *rural* maupun *urban*. Hal ini karena pelabuhan bukan saja melayani jasa transportasi, melainkan lebih dari itu menyediakan lapangan pekerjaan, pusat perdagangan, rekreasi, *dock service*, dan sederet aktivitas turunan yang dihasilkan dari satu kegiatan ke kegiatan ekonomi lainnya.

Penelitian ini di laksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Berdasarkan data statistik perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2008 hasil produksi perikanan laut Kabupaten Lamongan 75% berasal dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka sangat penting untuk mengkaji dan mendalami sampai sejauh mana kontribusi dan peranan Pelabuhan

Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung pengembangan kegiatan perikanan masyarakat pesisir utara Kabupaten Lamongan.

1.2 Perumusan Masalah

Pelabuhan Perikanan merupakan basis utama kegiatan ekonomi perikanan yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut dan berfungsi sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan darat kedalam suatu sistem yang berdaya guna tinggi. Pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan dari wilayah yang bersangkutan.

Fungsi pokok Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan, dan pemasaran serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. Berdasarkan fungsi itu maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pelabuhan ini adalah dengan pelayanan yang diberikan diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kegiatan masyarakat nelayan pesisir utara Kabupaten Lamongan.

Berpijak pada landasan diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang dibatasi pada :

1. Bagaimanakah profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
2. Sejauh mana peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam pengembangan kegiatan perikanan masyarakat nelayan di Desa Brondong
3. Bagaimanakah kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap pembangunan perikanan di kabupaten Lamongan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari :

1. Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
2. Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam pengembangan kegiatan perikanan masyarakat nelayan di desa Brondong
3. Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap pembangunan perikanan di kabupaten Lamongan

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

A. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Sebagai bahan acuan dalam merumuskan, arah, dan pola kebijakan yang tepat untuk pembangunan masyarakat nelayan dalam hal penataan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

B. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan masalah pengembangan disektor perikanan.

C. Masyarakat Nelayan

Sebagai bahan informasi tentang peranan Pelabuhan Perikanan dalam pembangunan sektor perikanan.

D. Peneliti

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Pelabuhan di Indonesia

Pembangunan merupakan suatu proses *transformasi* yang ditandai oleh perubahan struktural pada landasan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat dimana menurut Mubyarto (1986), suatu pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf yang bersifat *multidimensional*. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan, sumber pemenuhan gizi masyarakat serta sumber devisa bagi negara.

Dalam usaha meningkatkan produksi perikanan laut pengembangan infra struktur secara lengkap akan memicu perkembangan pembangunan kelautan yang merupakan salah satu pintu keberhasilan pembangunan. Menurut Sukmadinata (1995), komitmen dan dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap suatu pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Noegroho (2005), menambahkan bahwa inti dari strategi pembangunan kelautan adalah memprioritaskan pembangunan kelembagaan dengan cara meningkatkan kinerja masing-masing institusi tersebut. Salah satu untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan pelabuhan perikanan. Menurut Dahuri (2002), bahwa untuk membangun perekonomian nasional maka perlu *merevitalisasi* sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.

Pengembangan pelabuhan perikanan memberikan dampak/pengaruh yang sangat luas (*multiplier effect*) terhadap struktur kehidupan sosial ekonomi

masyarakat. Yang dimaksudkan masyarakat disini adalah masyarakat nelayan yang mendiami suatu wilayah pesisir tertentu. Menurut Dahuri (2002) perikanan memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang tinggi, sehingga diperlukan adanya investasi secara efisien terhadap sektor perikanan. Salah satu investasi yang dilakukan terhadap sektor perikanan yaitu dengan melakukan pengembangan pelabuhan perikanan untuk menciptakan sumber-sumber perekonomian baru yang berbasis pada keunggulan *komparatif* dan *kompetitif* dibidang perikanan tangkap.

Pembangunan pelabuhan perikanan bermaksud sebagai prasarana untuk menunjang kegiatan produksi perikanan oleh masyarakat nelayan supaya optimal. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, pusat pembinaan mutu hasil perikanan serta sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan (Effandi, 1994).

Tujuan dari penyediaan dan pembangunan pelabuhan perikanan adalah:

1. Untuk menciptakan iklim usaha yang menggairahkan masyarakat untuk menanamkan modalnya di bidang perikanan dengan usaha yang menguntungkan.
2. Mengurangi tekanan terhadap daerah-daerah yang kritis karena terlalu padat pengusaha-pengusahanya serta mengarahkan ke daerah-daerah potensial.
3. Menumbuhkan usaha perikanan yang saling menguntungkan antara perikanan tradisional dan industri.

4. Meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah remote yang secara tidak langsung membantu terciptanya ketahanan nasional di daerah-daerah perbatasan.
5. Mengembangkan pola pemasaran ikan basah dengan sistem rantai dingin dalam upaya menggalakan konsumsi ikan.

2.1.2 Definisi dan profil Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan merupakan suatu tempat yang terlindung dari gerakan gelombang laut sehingga bongkar muat dapat di laksanakan demi menjamin keamanan barang (Kramadibrata, 1985)

Sedangkan menurut Salim (1994), Pelabuhan secara umum bisa di artikan sebagai tempat (daerah perairan dan daratan) kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan bongkar muat barang serta turun naik penumpang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal-kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Pengembangan merupakan strategi secara *komparatif* dan *kompetitif* yang bertujuan untuk memperluas fungsi dan peranan dengan cara melengkapi, memperbaiki serta membangun fasilitas-fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan menentukan dalam pengembangan perikanan tangkap, karena kapal perikanan memerlukan tempat yang aman untuk berlabuh

guna membongkar hasil tangkapannya, serta melakukan persiapan ke laut (Hamzah, 1990).

Sebagai landasan hukum pelabuhan perikanan adalah Undang-Undang Perikanan nomor 9 tahun 1985 pasal 18 yang menyebutkan bahwa pemerintah membangun dan membina pra sarana perikanan. Ketentuan pelaksanaan, kedudukan, fungsi, pengelolaan dan penggunaan pra sarana perikanan di atur dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan tugas pokoknya sebagai pusat pengembangan perikanan, maka pelabuhan perikanan di tujukan untuk meningkatkan produksi dalam arti luas meliputi pelayanan operasi penangkapan ikan, pembongkaran hasil tangkapan, pemasaran, pengawetan ikan, perawatan kapal dan alat tangkapnya serta pembinaan masyarakat nelayan (Effandi, 1994).

Jika tujuan diadakannya pelabuhan perikanan tercapai akan sangat bermanfaat sekali, hal ini sesuai dengan fungsi dari pelabuhan perikanan itu sendiri. Adapun fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan
2. Tempat berlabuhnya kapal perikanan
3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
4. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan
5. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
6. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
7. Serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

2.1.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Sesuai bobot kerja, produktivitas, kapasitas sarana pokok, fungsional dan penunjang serta pengembangannya, berdasarkan KEPMEN Kelautan dan

Perikanan No : KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan diklasifikasikan menjadi 4 kelas, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pelabuhan Perikanan tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

- Memiliki jangkauan operasional di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan perairan internasional.
- Mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton per hari atau 73.000 ton per tahun (baik pemasaran di dalam maupun di luar negeri/ekspor).
- Pelabuhan ini menampung kapal berukuran lebih besar 60 GT (gross tonage), dengan jumlah sampai dengan 100 unit kapal sekaligus.
- Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha.

b. Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

- Memiliki jangkauan operasional di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
- Mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan/atau mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 55 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri.
 - Pelabuhan ini menampung kapal berukuran 15 - 60 GT (gross tonage), dengan jumlah sampai dengan 50 unit kapal sekaligus.
 - Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha.
- c. Pelabuhan Perikanan tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)
- Memiliki jangkauan operasional di perairan pantai.
 - Mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan/atau mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.
 - Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.
 - Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar.
 - Pelabuhan ini menampung kapal berukuran 15 GT (gross tonage), dengan jumlah sampai dengan 25 unit kapal sekaligus.
 - Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Dibangun untuk melengkapi ke tiga tipe pelabuhan perikanan tersebut di atas yaitu suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang berskala lebih kecil daripada pelabuhan perikanan pantai ditinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan, maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya.
 - Menampung pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton per hari.

- Menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sebanyak 15 unit sekaligus.
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m
- Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 1 Ha.

(Murdiyanto B, 2004).

2.1.4 Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

2.1.4.1 Peran Pelabuhan Perikanan

Pada hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto B, 2004).

2.1.4.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*general function*) dan fungsi khusus (*special function*). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pada semua pelabuhan sedangkan yang dimaksud fungsi khusus adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan pelayanan khusus yang belum terlayani oleh adanya berbagai fasilitas fungsi umum. Beberapa fungsi umum pelabuhan merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayanan lainnya yang harus dapat dilakukan di setiap pelabuhan perikanan seperti juga di pelabuhan yang bukan untuk kegiatan perikanan (Murdiyanto B, 2004).

Fungsi khusus merupakan tugas pelayanan di pelabuhan perikanan yang membedakan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lain yang bukan

pelabuhan perikanan. Fungsi khusus ini terutama diturunkan dari karakteristik komoditas perikanan yang mudah busuk (*Highly perishable*). Sifat mudah busuk ini menghendaki pelayanan khusus berupa penanganan, pendistribusian hasil ikan secara cepat ataupun pengolahan yang tepat. Untuk komoditas hasil perikanan ini perlu tindakan bongkar muat ikan dilakukan berkali-kali dalam sehari (Murdiyanto B, 2004).

Adapun dilihat dari sisi fungsi dan perannya, pelabuhan perikanan memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Umum :

- Jalan keluar-masuk pendaratan ikan
- Menyediakan kolam air yang terlindung dari gelombang
- Sebagai dermaga tempat sandar kapal
- Menyediakan pelayanan navigasi, penahan gelombang, perkantoran, halaman parkir, dan fasilitas lainnya.

2. Fungsi Khusus :

- Fasilitas pelelangan ikan
- Fasilitas pengolahan dan *grading* hasil tangkapan
- Fasilitas tangkapan
- Fasilitas pabrik es
- Fasilitas penyediaan dan perawatan sarana produksi perikanan

(Lubis, 2000 dalam Thamrin, 2005).

2.1.5 Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Pembangunan Daerah

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan

penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam menunjang pemanfaatan produksi pasca panen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional
2. Pembangunan industri baik hulu maupun hilir
3. Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

Sehingga peranan pelabuhan perikanan sangat penting sekali dalam aktivitas kegiatan perekonomian. Didalam pembangunan pelabuhan perikanan harus diperhatikan dan diteliti tentang potensi yang ada terutama para nelayan yang menangkap ikan dan yang akan melelang ikan.

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah berusaha mengoptimalkan potensi-potensi daerah guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya, tak terkecuali di sektor perikanan. Bahkan dengan adanya krisis moneter sejak tahun 1998, sektor perikanan menjadi semakin populer baik dikalangan pengusaha maupun pemerintah. Krisis ekonomi dan depresi rupiah terhadap dollar berdampak terhadap merosotnya kontribusi ekonomi terhadap sektor lain, namun di sektor perikanan justru menunjukkan sebaliknya. Data terakhir menunjukkan bahwa ekspor komoditas hasil laut pada tahun 1997 mencapai 1.617,5 juta dollar AS, disini tampaklah bahwa pada masa krisis, sektor perikanan justru menjadi tumpuan. Ini menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor yang “tahan banting” dan mampu menghadapi krisis (Sudrajat.I, 2002).

Potensi perikanan dan kelautan yang sedemikian besar semestinya dapat berkinerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi terutama bagi tarap kesejahteraan nelayan. Tetapi orang yang merasakan

dampak berbagai kemajuan dalam sektor perikanan hanya terbatas pada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat (misalnya para pedagang ikan baik ditingkat lokal maupun di tingkat Eksportir). Sedangkan nelayan sebagai ujung tombak disektor perikanan kondisinya tetap saja tidak berubah. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi akibat sistem yang terbentuk dari hubungan antara nelayan dan para pedagang disektor perikanan umumnya lebih menguntungkan pihak pedagang. Hal ini sesuai dengan teori Scott “selama hubungan sosial terjadi antara orang-orang yang tidak sama kuat, maka ada kemungkinan hubungan itu berat sebelah”.

Secara kumulatif, indikator keberhasilan pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil di perbaiki dan di tingkatkan.
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya berhasil di gerakkan.
3. Sejauhmana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil di tumbuhkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Pelabuhan Perikanan

Hasil penelitian Thamrin (2005) dengan judul “Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur” Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong awalnya merupakan PPI, kemudian menjadi Pelabuhan Perikanan Tipe C, Berdasar SK. Mentan No.428/KPTS /410/1987, ditetapkan menjadi UPT Pusat (type B) Deptan. Berdasar SK Mentan No. 1082/Kpts/OT.210/10/1999 dan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.

KEP.26.I/MEN/2001, status operasionalnya ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan yang diusahakan. Dengan tingginya tingkat operasional Pelabuhan Perikanan nusantara Brondong yang telah memberikan manfaat yang cukup tinggi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat perikanan, maka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pelabuhan perikanan nusantara brondong terhadap masyarakat perikanan berdasarkan peraturan pemerintah No.2 tahun 1990 serta sesuai dengan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 26.I/MEN/2001 status operasionalnya di tingkatkan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara menjadi Pelabuhan Perikanan yang di usahakan, melalui Perum Prasarana Perikanan samudra cabang Brondong. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Laksanakan oleh KUD Minatani.

2.2.2 Peran Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sejak operasional sebagai penyedia fasilitas pelabuhan telah memberikan berbagai pelayanan kepada nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Manfaat (Outcome) dari kegiatan tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat perikanan. Pembangunan fasilitas operasional pelabuhan secara umum yang telah di laksanakan sampai dengan tahun anggaran 2004 adalah :

1. Pengadaan dan pemasangan rambu navigasi
2. Rehabilitasi BPN, Pembuatan pos masuk, pembuatan pekerjaan rehabilitasi dan turap
3. pengadaan dan penyiapan ruang pengendalian serta pengadaan ruang WASDAL
4. Rehabilitasi TPI dan pembangunan Los pemotongan ikan
5. pengadaan sarana penangkapan ikan, timbangan untuk pelelangan, refer kontainer dan instalasi listrik untuk insentififikasi pembinaan mutu.

2.2.3 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perikanan

Hasil penelitian Parwinia (2004) yang di sajikan dalam makalah disertasi pasca sarjana IPB dengan judul Evaluasi Kebijakan Perikanan mengenai pengembangan Agribisnis Terpadu” mengungkapkan bahwa Pemerintah memegang peranan yang besar dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Paling kurang tiga peran pemerintah dalam pembangunan perikanan yaitu pembuatan kebijakan (perencanaan), regulator dan pengawasan.

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pembangunan perikanan. Pembangunan perikanan harus didasari dengan data yang akurat dalam menentukan pengambilan keputusan. Lembaga penelitian melakukan penelitian terapan yang kemudian disinergikan dengan lembaga lainnya yang mempunyai fungsi pembinaan sumber daya ikan (tata ruang, konservasi dan rehabilitasi), fungsi pengawasan (Fishery Control dan Fishing Inspector), pembinaan perikanan tangkap, pembinaan perikanan budidaya dan pembinaan investasi dan pemasaran dalam mewujudkan regulasi dan master plan pembangunan perikanan. Perumusan regulasi dan master plan pembangunan perikanan diserahkan tugasnya pada lembaga Kesekretariatan. Berdasarkan master plan tersebut unit pelaksana teknis atau lembaga pembinaan perikanan tangkap, pembinaan perikanan budidaya dan pembinaan investasi dan pemasaran pembangunan perikanan sesuai yang telah digariskan (Tarumingkeng, 2001).

Pemanfaatan pengindraan jarak jauh dengan NOAA satelit dalam kegiatan usaha penangkapan ikan merupakan contoh aplikasi pembangunan perikanan. Hasil pengindraan jarak jauh yang menginformasikan keberadaan penumpukan khlorofil dipadukan laporan *fishing inspector* (yang melaporkan tentang lokasi penangkapan, volume penangkapan , jenis dan ukuran ikan) akan

menghasilkan peta migrasi ikan. Berdasarkan peta tersebut kemudian dibuat regulasi perusahaan penangkapan ikan yang meliputi tata ruang, nursery ground, waktu penangkapan dan jenis alat tangkap dan bobot kapal. Berdasarkan regulasi dan perencanaan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PK2P melakukan pembangunan perikanan tangkap (Tarumingkeng, 2001).

2.3 Kerangka Berpikir

Pembangunan dunia perikanan Indonesia merupakan suatu proses yang mempunyai korelasi dan berkesinambungan antar obyek yang satu dengan obyek yang lain. Dimana dalam pembangunan dunia perikanan tidak bisa lepas dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti pembangunan pelabuhan perikanan.

Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan memerlukan adanya prasarana pelabuhan perikanan sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

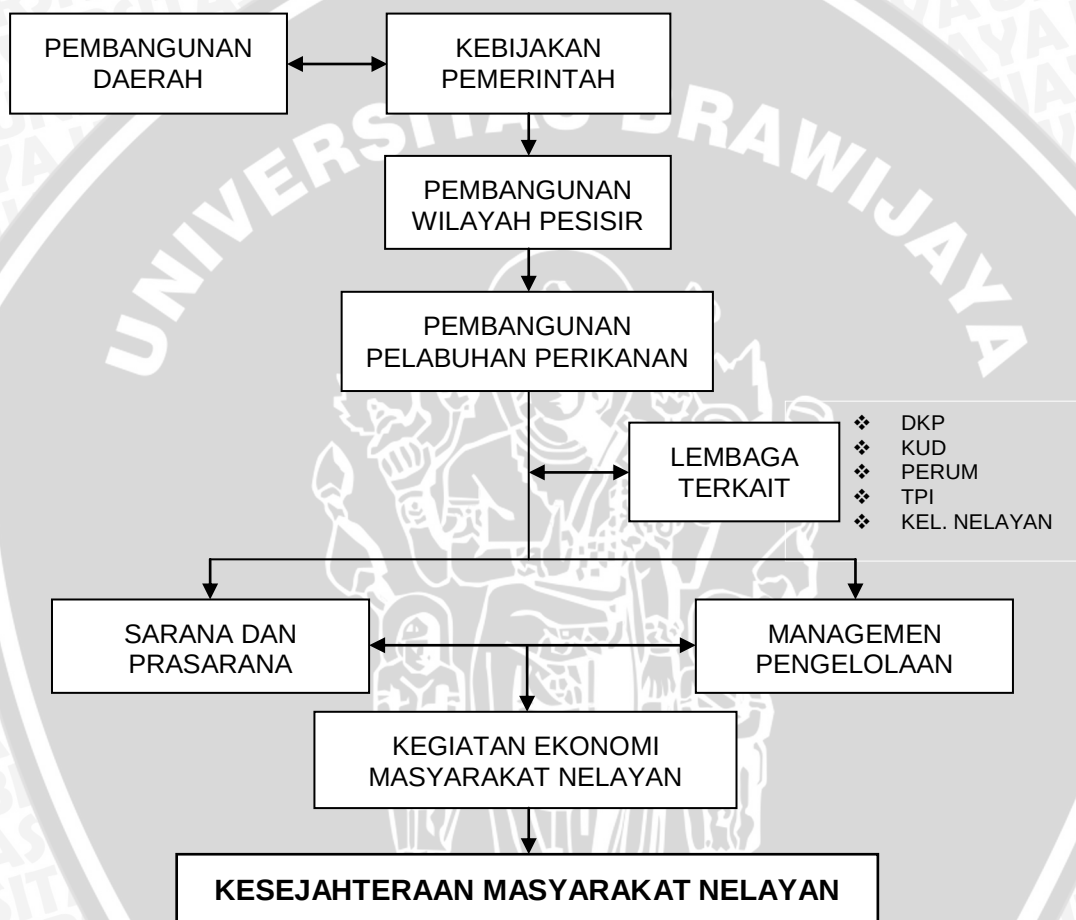
Pelabuhan Perikanan memberikan dampak/pengaruh yang sangat luas (*multiplier effect*) terhadap struktur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang dimaksudkan masyarakat disini adalah masyarakat nelayan yang mendiami suatu wilayah pesisir tertentu.

Berdasarkan pada gambaran diatas maka dasar pemikiran dari penelitian ini adalah :

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir utara Kabupaten Lamongan,

sehingga secara langsung memberikan kontribusi terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

2. Sebagai unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan bagian integral dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan masyarakat nelayan.



Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian

III. Metode Penelitian

3.1 Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu tempat utama jalur pemasaran ikan di Jawa Timur, dan lokasi yang berada di jalur pantura pulau Jawa sehingga sangat menarik untuk dikaji permasalahan yang ada di dalamnya.

3.2 Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana jenis penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi (Azwar, 2007).

Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk melukiskan keadaan obyek dan persoalannya. Peneliti mengembangkan dan menghimpun fakta dan hanya mengungkapkan fakta dan melakukan interpretasi yang cukup. Secara khusus, penelitian ini berusaha memberikan gambaran keadaan wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong saat ini serta gambaran kehidupan dan kondisi masyarakat nelayan di pesisir utara Jawa Timur.

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini, diharapkan peneliti mampu untuk menggambarkan segala kondisi yang ada di sana, menganalisa

segala permasalahan dan juga memungkinkan untuk memberikan solusi atau pemecahan permasalahan bagi hambatan yang dihadapi.

Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus menurut Yin (2002) adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.

Tujuan dari studi kasus adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Pada penelitian ini studi kasus dilakukan untuk mempelajari secara mendalam mengenai peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat nelayan di desa Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Studi kasus ini dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi apa saja yang diperoleh masyarakat nelayan dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Marzuki (1993), yang dimaksud data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi dan wawancara kepada nelayan, pedagang, pengepul, kuli ikan, dan instansi terkait.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri secara langsung oleh peneliti. Data sekunder ini diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode studi dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, data statistik, majalah, keterangan-keterangan ataupun publikasi lainnya (Arikunto, 2006).

Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam kegiatan penelitian ini meliputi :

- Kondisi umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografi dan topografi wilayah
- Keadaan penduduk
- Kondisi umum usaha perikanan di sekitar lokasi penelitian

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder antara lain :

- Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- Kantor Perum Prasarana Samudera Cabang Brondong
- Kantor BPS dan DKP Kabupaten Lamongan
- Kantor Desa Brondong
- Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan ruang baca Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah; wawancara, observasi, dokumentasi. Masing-masing teknik pengumpulan data tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

➤ Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi secara langsung dengan jalan tanya jawab dengan responden. Wawancara merupakan salah satu sumber informasi yang esensial dalam studi kasus. Dimana peneliti dapat bertanya kepada responden tentang fakta-fakta suatu

peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada (Yin, 2002).

Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada, instansi dan masyarakat yang terlibat langsung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Sebagai pedoman wawancara agar lebih terstruktur maka dilakukan penggolongan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada jenis narasumber sebagai berikut:

1. Instansi (Pejabat atau Pegawai PPN Brondong)

- Fungsi dan tujuan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Peran masing-masing instansi dalam operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung pengembangan kegiatan perikanan.
- Kebijakan-kebijakan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong kedepan dalam membantu kelancaran kegiatan perikanan.

2. Pedagang ikan dan pengolah ikan

- Kondisi usaha sebelum dan sesudah dibangunnya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Kondisi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung perkembangan usaha perikanan.
- Dampak kebijakan yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap perkembangan usaha perikanan.

3. Nelayan

- Kondisi kegiatan perikanan sebelum dan sesudah dibangunnya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung kelancaran kegiatan perikanan.
- Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong bagi perlindungan dan pembinaan masyarakat nelayan.

➤ **Observasi**

Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi langsung dan observasi partisipan. Observasi langsung adalah dengan membuat kunjungan langsung terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung. Yang berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Sedangkan observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2002). Dalam lingkungan masyarakat pesisir misalnya, peran ini bisa dilakukan melalui interaksi sosial umum dengan berbagai lapisan penduduk hingga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan fungsional khusus dalam lingkungan sosial yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi langsung terhadap keadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan aktivitas yang ada didalamnya.

➤ Dokumentasi

Untuk study kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. *Pertama*, dokumen membantu memverifikasikan ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, jika bukti dokumenter bertentangan bukannya mendukung, penelitian mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. seorang peneliti dapat mulai mengajukan pertanyaan baru tentang komunikasi dan jaringan kerja suatu organisasi. Namun begitu, inferensi-inferensi ini harus diperlukan hanya sebagai temuan definitive, sebab inferensi ini pada suatu saat bias menghasilkan arah yang keliru (Yin, 2002).

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk meneliti lebih jauh tentang Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yaitu meliputi proposal proyek, laporan sementara dan kertas-kertas kerja, naskah dan cetakan lengkap, serta upaya mengabadikan sumber data yang dianggap dapat menunjang berlangsungnya penelitian.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden. Yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006).

Tiap penelitian memerlukan sejumlah orang yang harus diselidiki. Secara ideal kita harus menyelidiki keseluruhan populasi. Bila populasi terlampau besar

maka diambil sejumlah sampel yang representatif, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi itu. Dengan menyelidiki sampel bisa diambil kesimpulan berupa generalisasi, yang bisa juga berlaku bagi keseluruhan populasi (Nasution, 2007).

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1989). Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah masyarakat nelayan dan instansi yang terkait langsung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlah sampel lebih sedikit dari populasi). Karena kesimpulan dari sampel merupakan penggambaran dari populasi maka harus ada syarat-syarat tertentu di dalam pemilihan sampel. Syarat utamanya adalah sampel harus menjadi cermin dari populasi, sampel harus merupakan populasi dalam bentuk kecil. Kalau syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesimpulan mengenai populasi tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, kesimpulan akan menyimpang atau *biased conclusion* (Djarwanto dan Subagyo, 1993). Menurut Sumanto (1995), sampling atau teknik pengambilan sampel merupakan proses pemilihan jumlah individu (objek penelitian) untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-individu tersebut merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar di mana obyek itu dipilih.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified random sampling yaitu suatu prosedur pengambilan sampel secara acak. Alokasi pengambilan sampel yang di gunakan adalah alokasi sembarang. Menurut Anwar (2002), alokasi sembarang adalah jumlah pengambilan sampel sangat tergantung dari subyektivitas peneliti.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil berdasarkan jumlah setiap populasi yang terkait dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Jumlah sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 orang (responden) dengan perincian sebagai berikut :Nelayan (buruh dan juragan) 15 orang, hal ini berdasarkan pada keberadaan jumlah nelayan yang terlibat langsung dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pengepul, agen dan pedagang ikan 5 orang, pengolah 2 orang, Kuli Ikan 3 orang, dan instansi terkait 5 orang dengan pertimbangan bahwa instansi yang terkait dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdiri dari 5 instansi .

3.6 Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuan analisa data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data yang ditemukan hingga menjadi suatu data yang terstruktur serta tersusun lebih berarti (Sumanto, 1995).

Analisis data akan dilakukan secara deskriptif terhadap operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berupa pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya dan pelayanan yang telah diupayakannya.

Untuk menjawab beberapa tujuan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Untuk menjawab Tujuan 1 adalah:

Dengan melihat bagaimana profil dan status PPN Brondong dan instansi-instansi yang terkait didalamnya.

2. Untuk menjawab Tujuan 2 adalah:

Peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dalam pengembangan kegiatan perikanan yang mana peran dari Perikanan

Nusantara (PPN) Brondong membahas tentang penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan dalam bentuk fasilitas-fasilitas pelabuhan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang; Pelayanan jasa pelabuhan. Selain itu juga mengenai mekanisme kerja dan operasional dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong yaitu membahas tentang bagaimana implementasi dari fungsi-fungsi yang ada.

Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong adalah:

- a) Tempat tambat labuh kapal perikanan
- b) Tempat pendaratan ikan
- c) Tempat pemasaran dan distribusi ikan
- d) Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- e) Tempat pengumpulan data tangkapan
- f) Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- g) Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan
- h) Pusat pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan.

3. Untuk menjawab Tujuan 3 adalah:

Untuk melihat kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap kegiatan masyarakat perikanan dapat menggunakan variabel sebagai berikut :

a. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan:

Untuk melihat kontribusi dari variabel tersebut dapat menggunakan pendekatan Indeks Relatif Nilai Produksi (I) dengan formulasi sebagai berikut :

$$I = \frac{Np \times 100}{\frac{Nt}{Qp \times 100} \times Qt}$$

Keterangan :

Np = Nilai produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

N_t = Nilai produksi perikanan di Kabupaten Lamongan

Q_p = Jumlah produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Q_t = Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lamongan

Data produksi perikanan yang akan dianalisis adalah selama 6 periode (2004 - 2009) dari masing-masing tempat untuk periode yang sama. Indeks ini akan menjelaskan perbandingan produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Lamongan yang mana apabila :

$I = 1$; Produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Lamongan sama baiknya. Ini artinya bahwa kualitas pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sama baiknya dengan kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Lamongan.

$I > 1$; Produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong lebih baik apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Lamongan. Artinya adalah kualitas pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pun lebih baik daripada kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Lamongan.

$I < 1$; Produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong lebih jelek apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Lamongan. Yang berarti bahwa kualitas pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong kurang baik dibandingkan dengan kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Lamongan.

b. Location Quotion (LQ)

Selain itu untuk melihat kontribusi PPN Brondong, dapat juga menggunakan pendekatan metode *Location Quotient (LQ)*, yaitu sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

v_i = Pendapatan (PDRB) sub sektor perikanan Kabupaten Lamongan

v_t = Pendapatan (PDRB) seluruh sektor Kabupaten Lamongan

V_i = Pendapatan (PDRB) sub sektor perikanan Propinsi Jawa Timur

V_t = Pendapatan (PDRB) seluruh sektor Propinsi Jawa Timur

Apabila nilai

$LQ \geq 1$; maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor basis

$LQ < 1$; maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor non-basis.

Analisis Kuantitatif dilakukan dengan metode Location Quoantient (LQ) tujuannya untuk mengetahui potensi perikanan dengan teknik analisis untuk dasar acuan pembangunan (Sjahrir,1986).

Konsep basis ekonomi untuk mengetahui suatu sektor pembangunan ekonomi wilayah dan kegiatan basis, yang dapat melayani pasar daerah itu sendiri maupun pasar luar daerah (Diamark, 2000).

Dalam mengukur suatu sektor menjadi basis dilakukan dengan Location Quotien (LQ) perbandingan relatip kemampuan suatu sektor dalam wilayah yang ingin analisis, location quatien mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya LQ memiliki konsep yang sederhana, mudah diterapkan, sedangkan kelemahannya, adalah penambahan unit lokasi harus disesuaikan dengan penentuan kegiatan basis dan non basis, model ini kurang bisa diandalkan jika wilayah lebih luas (Anonymous,1997).

IV. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1 Keadaan Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, yang terletak di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, pada posisi koordinat 06° 53' 30, 81 LS dan 112° 17' 01, 22 BT. Secara Geografis Desa Brondong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara adalah Laut Jawa
- Sebelah Selatan adalah Kecamatan Laren
- Sebelah Barat adalah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban
- Sebelah Timur adalah Kecamatan Paciran.

Denah lokasi Pelabuhan dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2 Demografi

Penduduk di Kecamatan Brondong sebagian besar adalah suku Jawa dengan bahasa sehari-hari adalah bahasa Jawa dan sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2009 tercatat sebesar 54.995 jiwa yang terdiri dari 26.326 laki-laki dan 28.669 perempuan.

Sedangkan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Brondong cukup beragam, yaitu terdiri dari nelayan, petani, pengusaha, pedagang sampai PNS. Mata pencaharian terbesar di Kecamatan Brondong adalah sebagai nelayan sebesar 56 %. Hal ini dapat dibuktikan pada data jumlah penduduk Kecamatan Brondong berdasarkan mata pencaharian tahun 2009 dibawah ini.

Tabel 1. Data penduduk Kecamatan Brondong menurut mata pencaharian tahun 2009

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani dan Nelayan	20,937	56
2	Pengusaha	5,701	15,24
3	Pengrajin	4,481	12
4	Buruh	4,150	11,09
5	Pedagang	1,778	4,76
6	PNS	353	0,94
	Jumlah	37,400	100

Sumber : Kecamatan Brondong 2009

4.3 Musim

Kabupaten Lamongan beriklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu :

- Musim hujan : Berkisar antara bulan Oktober – bulan April
- Musim kemarau : Berkisar antara bulan Mei – bulan September

Keadaan iklim disuatu daerah biasanya dipengaruhi oleh keadaan musim setempat seperti keadaan umumnya di Lamongan. Daerah Desa Brondong memiliki dua musim juga yaitu musim penghujan, pada saat itu biasanya angin barat bertiup sangat kencang atau sering disebut musim barat, sedangkan untuk musim kemarau dimana pada saat itu gelombang mulai tenang dan dikenal dengan istilah musim timur.

Sedangkan untuk musim penangkapan dibagi menjadi tiga musim ikan, yaitu musim puncak, musim sedang dan musim paceklik yang berlangsung dalam satu periode penangkapan.

Musim ikan paceklik berlangsung antara bulan Desember sampai bulan Maret. Hal ini berkaitan dengan adanya musim barat, yaitu adanya angin barat yang sangat kencang dengan disertai dengan turunnya hujan, ditandai dengan adanya arus air yang bergerak searah angin barat kearah timur yang mana biasanya bersamaan dengan musim hujan. Bertiupnya angin barat yang kencang ini oleh nelayan Pantai Utara Jawa Timur disebut dengan istilah musim baratan,

dimana pada saat itu jarang sekali nelayan yang berani ke laut untuk melakukan operasi penangkapan karena akibat angin barat yang kencang menimbulkan gelombang ombak yang besar.

4.4 Keadaan Usaha Perikanan

Wilayah Brondong merupakan basis utama perikanan laut di Wilayah utara Jawa Timur (Muhammad, 2002). Wilayah laut utara dengan luas perairan laut menjangkau perairan lepas pantai di Laut Jawa merupakan penghasil jenis ikan pelagis seperti layang, dan ikan demersal seperti kakap merah dan kuningan.

Pada umumnya penduduk di Kelurahan Brondong bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh, dengan kondisi geografis dan topografi yang gersang dan letak daerah yang berada di daerah pesisir yang di tunjang dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang di dalamnya terdapat tempat pelelangan ikan maka secara otomatis kegiatan ekonomi penduduk berasal dari kegiatan perikanan.

Usaha perikanan di Desa Brondong terfokus pada usaha penangkapan dan pengolahan ikan, seperti pengeringan, pemindangan dan pengawetan dengan es. Faktor yang mempengaruhi keberadaan usaha perikanan tersebut antara lain; kedekatan dengan bahan baku, sarana dan prasarana yang memadai, dan kedekatan dengan akses pasar. Usaha perikanan secara umum di Desa Brondong adalah :

➤ Penangkapan

Sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2004, nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Tentu saja dalam hal ini tempat tinggal nelayan tidak jauh dari daerah penangkapan ikan (laut). seperti halnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, nelayan yang ada berasal dari

desa-desa sekitar pelabuhan seperti Desa Brondong, Blimbing, dan sekitarnya. Jumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara brondong yang dihitung berdasarkan jumlah alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada table 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2009

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap (unit)	Jumlah Nelayan / Alat Tangkap (Orang)	Jumlah Nelayan (Orang)
1	Mini Purse Seine	7	25	175
2	Dogol Besar	1.055	10	10.550
3	Dogol Kecil	338	6	2.028
4	Payang	48	12	576
5	Rawai	22	7	154
6	Gill net	3	6	18
7	Lainnya	55	5	275
	Jumlah	1.528		13.776

Sumber: PPN Brondong Tahun 2009

➤ Nelayan Mini Purse Seine

Nelayan mini purse seine merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap mini purse seine atau pukat cincin dalam pengoprasianya. Penangkapan dengan menggunakan mini purse seine sifatnya aktif yaitu berusaha mencari kawanan (kumpulan) ikan. Penangkapan di lakukan pada malam hari biasanya dengan menggunakan 1 sampai 2 buah kapal. Hasil tangkapan biasanya jenis ikan kembung, layang, bawal, selar dan lain-lain.

➤ Nelayan Payang

Nelayan payang adalah nelayan yang menggunakan payang sebagai alat tangkap dalam pengoprasianya. Payang merupakan jenis alat tangkap yang produktifitasnya sangat tinggi dan dapat di lakukan pada malam maupun siang hari. Dalam pengoperasiannya menggunakan alat bantu rumpon pada siang hari dan petromaks pada malam hari. Hasil tangkapan tergantung pada keadaan daerah dan banyak sedikitnya ikan yang

berkumpul di daerah tersebut (sekitar rumpon). Hasil tangkapan yang utama adalah jenis ikan pelagik kecil tongkol dan lain-lain.

➤ Nelayan Gill Net

Nelayan gill net adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap gill net dalam pengoprasianya. Gill net merupakan alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang yang di lengkapi dengan pelampung, pemberat ris atas bawah. Gill net merupakan jenis alat tangkap yang selektif dimana besar mata jaring bervariasi , disesuaikan dengan sasaran yang akan di tangkap. Hasil tangkapan yang utama dari alat tangkap ini antara lain tongkol, udang, lemuru, tongkol, cakalang, tenggiri dan jenis-jenis ikan-ikan demersal.

➤ Budidaya

Usaha budidaya di Kabupaten Lamongan merupakan budidaya tambak, sawah tambak, dan kolam dengan jumlah RTP dan nilai produksi untuk masing-masing usaha budidaya seperti pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Jenis Usaha Budidaya di Kabupaten Lamongan

No.	Jenis Usaha	Jumlah RTP	Nilai Produksi (ton)
1.	Tambak	195	1.338.70
2.	Sawah Tambak	20.944	31.194.70
3.	Kolam	2471	1.257.90
Jumlah		23.610	33.791.30

Sumber : Data Statistik Perikanan BPS Lamongan 2009

Mayoritas usaha budidaya yang ada di kabupaten Lamongan adalah sawah tambak. Hal ini di karenakan kondisi lingkungan dan struktur tanah yang mendukung untuk usaha tersebut, sedangkan usaha budidaya di tambak pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini di karenakan biaya produksi yang semakin tinggi sedangkan harga hasil produksi relatif mengalami penurunan.

➤ Pengolahan

- Pengeringan

Pengeringan ikan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan cara menyerapkannya menggunakan energi panas, biasanya kandungan air bahan dikurangi sampai batas tertentu dimana mikroba tidak dapat tumbuh lagi pada bahan tersebut (Muchtadi,1997).

Pengeringan ikan itu sendiri merupakan cara pengawetan ikan yang tertua, mulai pengeringan hanya dilakukan dengan menggunakan panas matahari dan tiupan angin. Pada prinsipnya pengeringan merupakan cara pengawetan ikan dengan mengurangi kandungan air pada tubuh ikan sebanyak mungkin sehingga kegiatan-kegiatan bakteri terhambat dan jika mungkin, mematikan bakteri tersebut (Murniyati,200).

- Pemindangan

Pemindangan adalah suatu teknik pengolahan dan pengawetan dengan cara merebus ikan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu di dalam suatu wadah. Pemindangan banyak sekali dilakukan dan merupakan suatu komoditi paling populer dikalangan konsumen ikan, karena rasanya enak dan spesifik. Pengolahan ikan pindang merupakan langkah alternatif apabila hasil produksi kapal purseiner melimpah dan tidak habis terjual sebagai ikan segar, sebagai upaya menjaga mutu sekaligus mempertahankan harga ikan hasil tangkapan. Usaha pengolahan pindang kering dapat dilakukan oleh semua anggota masyarakat pantai yang memiliki akses dalam penerimaan bahan baku maupun pemasarannya (<http://www.cofish.net>).

V. Hasil dan Pembahasan

5.1 Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pelabuhan Perikanan sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER 06/MEN/2007) diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan yang berbasis Perikanan Tangkap. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut maka dilakukan pengembangan dan pembangunan terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Gambar *Master Plan* PPN Brondong dapat dilihat pada lampiran 2.

Dalam implementasinya, dengan melihat tingkat operasional PPN Brondong dalam memberikan pelayanan serta fasilitas produksi beserta pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk kelestariannya PPN Brondong terbukti mampu melakukan revitalisasi terhadap fungsi dan peranannya sehingga menjadikannya sebagai “*Centre of Excellence*” bagi pengembangan perikanan tangkap serta sebagai pusat pembinaan nelayan dan industri pengolahan hasil perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selain sebagai basis utama perikanan laut di wilayah utara Jawa Timur karena daerah tangkapnya (*fishing*

ground) adalah laut utara jawa yang menjangkau perairan laut lepas pantai yang sangat potensial dengan beragam jenis ikan, baik ikan pelagis maupun demersal. PPN Brondong juga mampu menstabilkan harga ikan sebagai pemicu dalam menarik minat nelayan daerah lain untuk memasarkan ikannya di PPN Brondong.

5.1.1 Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/MEN/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas yaitu melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan penangkapan untuk pelestariannya dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Tempat tambat labuh kapal perikanan
2. Tempat pendaratan ikan
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan
4. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
5. Tempat pengumpulan data tangkapan
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
7. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan
8. Pusat pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan.

5.1.2 Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memiliki visi, misi dan tujuan. Adapun visi, misi dan tujuan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah sebagai berikut :

a. Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

“Terwujudnya Pelabuhan perikanan Nusantara Brondong sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan terpadu yang berwawasan pengelolaan Sumberdaya Ikan yang berkelanjutan sebagai wahana untuk mensejahterakan masyarakat”.

b. Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Untuk dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan melihat tingginya tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang memberikan manfaat cukup besar terhadap kegiatan ekonomi nelayan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha penangkapan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan, peyediaan bahan baku industri dan penerimaan devisa Negara.
2. Meningkatkan kualitas dan harga ikan yang didaratkan dan didistribusikan ke daerah pemasaran.
3. Meciptakan iklim yang kondusif bagi investasi usaha di lingkungan Pelabuhan.
4. Meningkatkan Koordinasi pelayanan dan pelaksanaan tugas berbagai instansi dan lembaga yang terkait dalam usaha perikanan tangkap.
5. Meningkatkan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penangkapan sumber daya kelautan dan perikanan.

6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.3 Tujuan Sasaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dengan sasaran yang dinilai dapat mendukung keberhasilan dari tujuan tersebut sesuai dengan Renstra. Tujuan serta sasaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Peningkatan produksi perikanan tangkap
- b. Pemberdayaan masyarakat perikanan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
- e. Meningkatkan fasilitas operasional pelabuhan perikanan
- f. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap

2. Sasaran:

- a. Meningkatkan frekuensi kunjungan kapal yang berkunjung
- b. Meningkatkan jumlah ikan yang didaratkan
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- d. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e. Tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai
- f. Terciptanya lingkungan pelabuhan yang bersih dan higienis
- g. Tersedianya data informasi yang akurat

5.1.4 Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

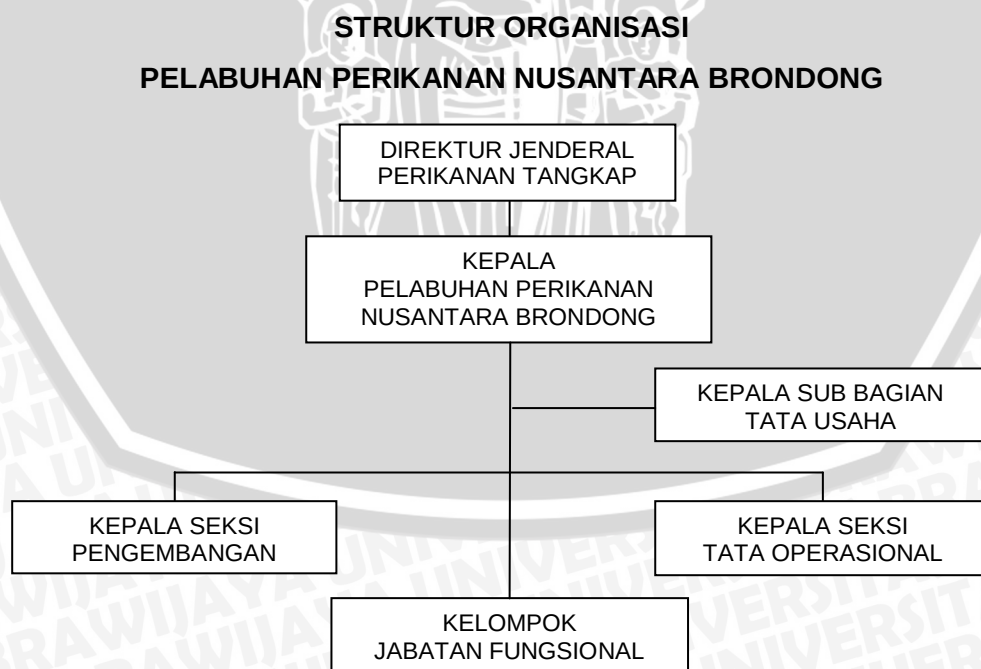
Susunan organisasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menggunakan tipe lini dimana rantai perintah adalah jelas dan mengalir kebawah melalui tingkatan-tingkatan manajerial dan setiap bagian mempunyai hubungan pelaporan hanya dengan satu atasan yaitu Kepala Pelabuhan dimana memegang wewenang tertinggi sehingga ada kesatuan perintah.

Susunan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.PER.06/MEN/2008, tanggal 1 januari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan adalah :

- a) Kepala Pelabuhan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestariannya dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
- b) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.
- c) Seksi Tata Operasional, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan, pengolahan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

- d) Seksi Pengembangan, mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan saran dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan, dan kegiatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.PER.06/MEN/2008, tanggal 1 januari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

5.1.5 Kelembagaan Yang Terkait Dengan Pengelolaan PPN Brondong

Dengan didasarkan pada KEPMENTAN No.1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang tata hubungan kerja UPT Pelabuhan Perikanan dengan instansi terkait, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong banyak bekerjasama dengan instansi yang mempunyai sector terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menciptakan kondisi pelabuhan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Lembaga instansi yang terkait langsung dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diantaranya adalah:

1. Pengawas Sumber Daya Ikan (WASDI)

Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan berharap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dapat optimal dan terus menerus namun tetap terkendali. Hal ini termaktub dalam visi Pengawas Sumber Daya Ikan yaitu *“mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggung jawab”*.

Sedangkan misi pengawasan sumber daya ikan adalah:

- Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan berlangsung secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan.

Dalam melakukan pengawasan tiga hal pokok yang sangat penting untuk diperhatikan antara lain :

1. Penataan perijinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu pelanggaran
2. Pengawasan di lapangan
3. Penegakan hukum (proses pengadilan), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kondisi Pengawas Sumber Daya Ikan (WASDI) dapat dilihat pada lampiran 3.

2. Perum PPS Cabang Brondong

Perum didirikan berdasarkan PP No. 2 Tahun 1990, tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudra yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000. Perum berfungsi meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, meningkatkan wiraswasta serta teknologi perikanan, serta menumbuh kembangkan kegiatan perikanan. Jenis usaha yang dikelola Perum dalam membantu pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini antara lain :

1. Mengusahakan sarana pelabuhan perikanan yang wewenang dan kepemilikannya berada pada perusahaan seperti tambat labuh, pelayanan sarana lelang, penyewaan ruang, gudang ikan, ruang pengolahan, pengepakan, bangunan, kantor, kios, pabrik es, bengkel, dock, tangki, penyaluran bahan bakar, pelayanan bongkar muat, tanah industry dan tanah pelataran.
2. Mengusahakan sarana pelayanan umum yang penguasaan pengelolaannya berada pada pihak ketiga (pemberian jasa penggunaan telepon, facsimile, listrik, dan air).

3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyaluran perbekalan kapal seperti garam, es, air, umpan hidup dan sebagainya.

Kondisi Perum PPS cabang Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

3. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Dalam pengoperasionalan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengingat pelabuhan berlokasi di Kabupaten Lamongan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lamongan. Bentuk koordinasi tersebut diantaranya adalah berupa pemberian penyuluhan kepada nelayan oleh Petugas Penyuluh Perikanan Dinas, seperti kasus formalin, dalam mengatasi masalah tersebut Dinas Perikanan mendirikan tempat test uji formalin yang berlokasi di Pelabuhan. Selain itu juga pengumpulan data teknis pelabuhan untuk pertanggungjawaban petugas lapangan Dinas Perikanan sebagai data statistic Pemerintah Kabupaten.

4. KUD Mina Tani

Dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayanyang mengarah pada peningkatan perekonomian nasional, maka di kawasan pelabuhan juga didirikan KUD yang berangotakan masyarakat nelayan guna menunjang usahanya. KUD Mina Tani ini didirikan berdasarkan badan hokum Nomor 4716.B/BH/II/1980 dengan Peerubahan Anggaran Dasar Nomor 7166/BH/II/1995 dengan tugas pokok yaitu sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan/nelayan, dalam ipaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota KUD pada khususnya. Jenis usaha yang dilakukan KUD Mina Tani antara lain :

- Menyelenggarakan pelelangan ikan agar diperoleh harga ikan yang wajar.
- Mengelola nit simpan pinjam dan penyalur kredit khusus bagi nelayan.
- Penyediaan penyaluran sarana produksi serta barang kebutuhan sehari-hari.
- Mengadakan pelatihan usaha serta pemasaran hasil.
- Mengelola unit usaha pembayaran rekening listrik serta unit usaha SKT (Sigaret Kretek Tbk.)

Kondisi KUD Mina Tani Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

5. Puskesmas

Tingkat kesehatan individu sangat mendukung aktivitas kerja serta kualitas kerja yang dihasilkan, terutama bagi masyarakat nelayan dimana dalam melakukan aktivitas penangkapan diperlukan kondisi tubuh yang benar-benar sehat. Dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan kesehatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong bekerjasama dengan puskesmas pembantu yang merupakan anak cabang dari puskesmas induk di Kecamatan Brondong. Puskesmas ini mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat nelayan sekitar kawasan pelabuhan serta menangani kondisi gawat darurat nelayan akibat kecelakaan kerja. Kondisi Puskesmas Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

6. Bank Swamitra Mandiri

Bank Swamitra Mina merupakan lembaga keuangan yang dibentuk atas kerjasama KUD Mina Tani dengan Bank Bukopin yang bertujuan untuk membantu nelayan mengembangkan usahanya serta penyediaan modal.

Tugas Bank Bukopin adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan khususnya berkaitan dengan pemberian pinjaman modal untuk menjalankan usaha berikut pengembangannya.

7. Unit Usaha Kecil

Kegiatan operasional pelabuhan perikanan juga tidak terlepas dari peranan unit-unit usaha yang ikut menyediakan kebutuhan nelayan. Dalam kurun waktu hingga tahun 2007 ini terdapat sekitar 55 unit yang berada di kawasan pelabuhan. Unit tersebut antara lain :

- Kios alat-alat perikanan yang menjual peralatan mesin, pancing, tali pancing, box ikan, dan sebagainya.
- Unit perbekalan melaut yang menjual es balok, garam, jasa penggilingan es, strum accu dan lain-lain.
- Unit jasa seperti wartel, MCK.
- Warung-warung makan dan minuman.

Kondisi unit-unit usaha kecil di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

8. Jamsostek

Untuk mengatasi resiko bagi nelayan yang bisa terjadi kapan saja, dan bila resiko ini terjadi akan mengganggu ekonomi keluarga. Untuk itu PT. Jamsostek memberikan program Jamsostek Nelayan (Jamsostek TK LHK).

Jenis Program Jamsostek yang ada adalah:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JK).

Program tersebut berdasarkan Peraturan Manakertrans RI Nomor : PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja. Kondisi kantor JAMSOSTEK cabang Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

5.2 Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Dalam Pengembangan Kegiatan Perikanan Masyarakat Nelayan di Desa Brondong

Murdiyanto (2003) menyatakan bahwa Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat kedalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Pelabuhan Perikanan selain sebagai penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah, restoran, dll juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat disekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pelabuhan merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Disamping itu Direktorat Jenderal Perikanan juga menyatakan bahwa pelabuhan perikanan pada hakekatnya tidak lain adalah merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi memberikan pelayanan serta kemudahan-kemudahan bagi kelancaran proses produksi, pemasaran dan pengolahan ikan serta diarahkan kepada terciptanya iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pelabuhan perikanan merupakan tempat kegiatan ekonomi bidang perikanan dan diharapkan dapat merangsang dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut serta pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Nelayan dan perusahaan perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan kegiatan perikanan tangkap yaitu

sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan laut terutama yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan.

Implementasi dari fungsi pelabuhan perikanan yaitu telah dioperasionalkannya seluruh sumberdaya yang ada. Keluaran dari operasional tersebut adalah berupa pelayanan terhadap pengguna. Berdasarkan hasil kajian bahwa identifikasi terhadap pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan sebagai wujud peranan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif baik. Berdasarkan data sekunder dan observasi di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dibangun sebagai tempat berlabuh (*landing*) dan tambat/merapat (*mooring*) kapal perikanan. Kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan. Pengembangan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas kolam labuh untuk kapal berukuran besar atau diatas 30 GT memberikan banyak kemudahan dan keamanan bagi kapal ikan untuk berlabuh, baik dalam rangka mendaratkan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap serta tempat istirahat bagi nelayan sebelum berangkat lagi ke laut.

Jumlah kunjungan kapal / perahu pada suatu pelabuhan dapat menjadi salah satu indikator besarnya tingkat operasional pelabuhan tersebut. Dibanding tahun 2008, jumlah kapal yang berlabuh pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 1,01%. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan kapal sebanyak 22.327 kapal termasuk kapal collecting yaitu kapal yang mengangkut ikan yang bukan berasal dari tangkapannya sendiri. Namun bila dilihat dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

PPN Brondong sangat diperlukan karena harga jual ikan di PPN Brondong relatif stabil. Berikut ini adalah rata-rata kunjungan kapal per alat tangkap tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Rata-Rata Kunjungan Kapal Per Alat Tangkap Tahun 2009

No.	Jenis Alat Tangkap (GT)	Kunjungan Kapal	Lama Trip
1	Payang (10-20 GT)	1 kapal/hari	7 – 10 hari
2	Pukat Cincin (20-30 GT)	1 kapal/bulan	10 – 15 hari
3	Rawai/Pancing (5-20 GT)	1 kapal/hari	3 – 7 hari
4	Collecting (10-30 GT)	1 kapal/hari	10 – 12 hari
5	Gill Net (5-20 GT)	1 kapal/ hari	7 – 10 hari
6	Dogol Besar (10-20 GT)	34 kapal/hari	7 – 10 hari
7	Dogol Kecil (5-10 GT)	22 kapal/hari	1 hari
	Rata-Rata	61 kapal/hari	

Sumber PPN Brondong 2009

Sedangkan jumlah kunjungan kapal perikanan yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Jumlah Kunjungan Kapal Peralat Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2009.

No.	Bulan	Dogol Besar	Dogol Kecil	Payang/ Pukat Hitam	Rawai	Gill Net	Purse Saine	Angkut/ Collecting	Jumlah
1	Januari	666	305	16	30	-	-	29	1.046
2	Februari	612	320	18	15	1	1	18	985
3	Maret	1.446	635	7	24	-	8	81	2.201
4	April	1.589	726	1	16	-	1	100	2.433
5	Mei	1.621	683	1	12	-	1	96	2.414
6	Juni	1.571	683	-	20	-	2	85	2.361
7	Juli	1.590	732	1	18	-	6	99	2.446
8	Agustus	1.560	749	1	12	-	14	108	2.444
9	September	1.118	532	5	11	-	6	64	1.736
10	Oktober	1.669	844	2	36	-	4	92	2.647
11	November	1.457	784	-	19	-	4	90	2.354
12	Desember	1.572	812	4	33	-	4	78	2.506
	Jumlah	16.471	7.805	56	246	1	51	940	25.573

Sumber: PPN Brondong

Kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Brondong

2. Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

Selain dilengkapi kolam pelabuhan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dilengkapi juga dengan fasilitas dermaga yang memberikan banyak kemudahan bagi kapal ikan untuk membongkar ikan hasil tangkapan. Dibandingkan sebelum ada pelabuhan perikanan, dengan adanya dermaga maka hasil tangkapan lebih terjamin mutunya. Selain itu peran pelabuhan sebagai tempat pendaratan ikan antara lain adalah:

- (a) Penyediaan tenaga dan sarana pendaratan ikan
- (b) Penyediaan alat angkut dan alat bongkar ikan hasil tangkapan
- (c) Memberikan pelayanan teknis untuk pendaratan ikan

Untuk itu diperlukan dermaga dan lantai dermaga sebagai kegiatan bongkar muat ikan yang didaratkan agar dapat lebih terjamin kualitasnya terhadap penurunan mutu ikan dan menjaga sanitasi lingkungan tempat pendaratan ikan.

Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4. Dermaga Pelabuhan Nusantara Brondong

Letak Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang sangat strategis diharapkan kapal-kapal dapat mendaratkan hasil tangkapannya karena aksesibilitas transportasi darat relative dekat dengan Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Kemudahan dan pelayanan jasa yang diberikan oleh pelabuhan dapat memacu meningkatnya frekwensi kapal yang akan mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Produksi ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2009 sebesar 57.198.074 Kg dengan nilai Rp. 495.413.038.800,-. Ikan yang didaratkan bermacam-macam mulai dari jenis ikan demersal hingga pelagis, namun ikan yang dominan didaratkan adalah ikan demersal antara lain ikan kuningan, kapasan, manyung serta pari yang merupakan ikan jenis demersal. Jenis-jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Jenis dan Jumlah Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2009

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan		Harga Rata2 Per Kg (Rp.)
		Volume (Kg.)	Nilai (Rp.)	
1	Alu-Alu	110,570	543,226,000	4,000
2	Ayam-Ayam	475,480	2,080,403,000	4,350
3	Banyar	336,112	3,297,805,200	9,800
4	Beloso	1,887,520	8,234,625,000	4,350
5	Bawal Hitam	127,700	2,553,215,000	20,000
6	Baronang / Sadar	111,660	218,438,500	1,950
7	Cucut	458,167	5,809,021,100	12,650
8	Campuran	1,805,922	3,091,271,750	1,700
9	Cumi-Cumi	1,490,899	24,485,265,300	16,400
10	Ikan Jaket	437,270	4,463,054,000	10,200
11	Ikan Sebelah	141,150	1,541,720,000	10,900
12	Kakap Merah	1,119,768	32,069,794,300	28,600
13	Kembung	281,742	1,914,544,200	6,800
14	Kuningan	15,917,478	156,459,851,900	9,800
15	Kerapu	310,660	48,193,904,000	15,500
16	Kerong-Kerong	212,650	3,173,450,000	14,900
17	Kapasan	6,989,832	28,015,699,250	4,000
18	Kurisi	71,445	2,402,986,800	33,600
19	Kuwe	1,122,601	17,581,960,300	15,650
20	Layang	5,208,111	44,794,607,300	8,600
21	Lenyam	160,970	2,171,018,000	13,450
22	Lemuru	756,333	2,714,281,400	3,550
23	Lemadang	466,270	3,437,830,000	7,350
24	Layur	128,945	1,194,406,800	9,250
25	Mata Besar	9,013,878	50,100,355,450	5,550
26	Manyung	3,304,490	36,970,783,200	11,150
27	Pirik	208,610	387,894,500	1,850
28	Pari	2,252,034	18,153,514,100	8,000
29	Selar Kuning	261,900	2,203,964,450	8,400
30	Tengiri	449,450	12,025,865,000	26,750
31	Tetengkek	0	0	0
32	Tongkol	468,767	5,316,182,000	11,350
33	Tembang	187,600	585,090,000	3,100
34	Tonang	922,090	12,601,011,000	13,650
Jumlah Total 1 Thn.		57,198,074	495,413,038,800	

Sumber : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2009

Proses pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini:



Gambar 5. Proses Pendaratan Ikan

3. Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

Distribusi ikan olahan merupakan mata rantai terpenting dalam pengoptimalan hasil perikanan tangkap, karena dengan demikian hasil perikanan tidak terbuang dengan percuma (*losses*) namun dapat dinikmati pula oleh masyarakat yang jauh dari laut. Hal terpenting dari pendistribusian adalah mutu dari produk yang akan disalurkan kepada konsumen, sehingga pengusaha perlu memperhatikan jaminan mutu produk agar tidak membahayakan konsumen.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dapat menampung ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan Brondong atau ikan yang berasal dari daerah lain melalui jalan darat. kemudian dipasarkan di pelabuhan perikanan.

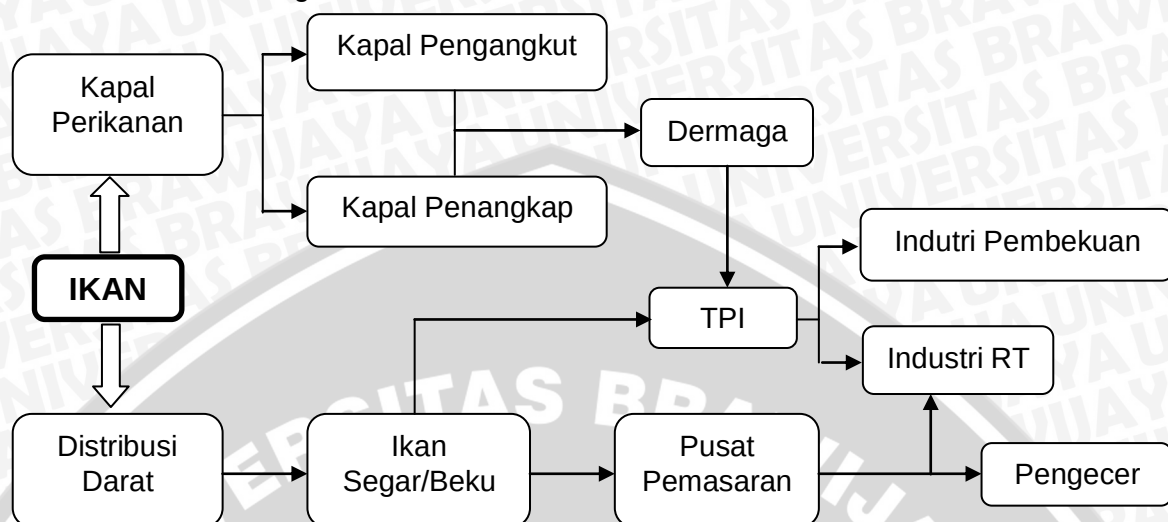
Namun Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong kurang dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelelangan Ikan. Hal ini disebabkan karena penyelenggara pelelangan yang telah ditunjuk belum melaksanakan pelelangan secara optimal. Aktivitas pelelangan ikan untuk menentukan kelayakan harga ikan baik bagi produsen/nelayan maupun bagi

pedagang masih belum berjalan dengan baik, dimana hanya dilakukan penimbangan saja atau pencatatan karena transaksi penjualan telah dilakukan oleh pemilik dan pedagang yaitu sudah adanya ikatan antara nelayan setempat atau dikenal dengan istilah “OPO”. Sehingga apabila tidak segera diantisipasi dapat mengakibatkan monopoli perdagangan ikan secara sepihak yang berakibat pada rendahnya harga jual bagi produsen/nelayan dan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan. Kendala yang dihadapi selama ini karena KUD tidak mampu mengambil alih penyedia modal/bakul. Keterkaitan nelayan dengan bakul disebabkan karena nelayan tidak mampu membeli perbekalan melaut secara kontan karena tingginya biaya operasional sehingga nelayan terikat pada pemilik modal. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk mengatasi pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, diperlukan koordinasi bersama Muspika setempat dan instansi terkait agar kinerja dalam melaksanakan sistem lelang dan pengelolaan TPI dapat menjadi lebih baik yaitu dengan jalan mengambil alih fungsi bakul/pemilik modal bagi nelayan oleh KUD. Jika kondisi tersebut dapat dicapai nelayan pasti akan mendapatkan harga yang wajar berdasarkan hasil lelang. Aktivitas di TPI Brondong dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini:



Gambar 6. Aktifitas di TPI Brondong

Berikut ini adalah alur proses distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.



Gambar 7. Alur Proses Distribusi Ikan di PPN Brondong



Gambar 8. Persiapan Pemasaran ke luar kota

Pemasaran hasil perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meliputi distribusi ikan dalam bentuk segar serta sudah berupa produk olahan. Produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan sekitar 30.776 ton (53,8%) berupa ikan segar, selebihnya adalah ikan asin yang sudah digarami diatas kapal. Sedangkan dalam proses selanjutnya diolah menjadi ikan pindang, ikan asin kering dan beberapa produk ikan olahan lainnya. Produk olahan yang dipasarkan keluar wilayah Lamongan antara lain ikan asin, pindang serta petis.

Dari Tabel dibawah ini dapat diketahui besarnya jumlah tangkapan yang dapat dipasarkan dan diolah berdasarkan jenis produknya.

Tabel 7. Produksi Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2009

No.	BULAN	PRODUKSI VOLUME	PRODUKSI IKAN (ton)				
			SEGAR	ASIN	PINDANG	PANGGANG	FILLET
1	Januari	2.686.606	1.784.018	315.138	201.375	134.601	251.474
2	Februari	2.407.234	1.650.882	282.680	129.991	113.849	229.832
3	Maret	5.605.776	3.877.577	693.485	231.466	250.219	553.029
4	April	5.921.634	4.052.204	756.225	232.695	281.734	598.776
5	Mei	5.766.942	3.906.632	727.756	242.695	264.663	625.196
6	Juni	5.139.457	3.511.024	659.508	186.897	247.651	534.377
7	Juli	5.206.909	3.474.898	680.947	239.439	272.812	538.813
8	Agustus	5.617.391	3.799.977	709.410	245.777	275.284	586.943
9	September	3.578.044	2.410.255	457.454	156.066	175.364	378.905
10	Oktober	5.472.961	3.723.960	666.323	214.439	252.112	616.127
11	November	4.746.094	3.242.723	576.441	172.648	213.963	540.319
12	Desember	5.049.026	3.513.085	569.891	179.585	216.386	570.079
	JUMLAH	57.198.074	38.947.235	7.095.258	2.433.073	2.698.638	6.023.870

Sumber : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2009

Bebagai bentuk olahan dan ikan segar yang didistribusikan untuk memenuhi permintaan pasar lokal maupun daerah lainnya. Untuk ikan segar dipasarkan ke daerah Jawa Timur dan Jakarta sebagai bahan baku pabrik pengolahan dan ikan pindang dipasarkan ke daerah Jawa Barat, sedangkan untuk ikan panggang sebagai konsumsi lokal.

4. Pelaksanaan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Dalam era globalisasi dan persaingan dalam pemasaran produk perikanan akan semakin ketat sehingga segala upaya perlu dilakukan untuk penguatan daya saing dipasar internasional. Persaingan ini lebih dipacu dengan bergaungnya issue-issue global seperti “food safety”, issue lingkungan hidup dan sebagainya. Bagi konsumen di dalam negeri juga terlihat adanya kecenderungan, tuntunan terhadap mutu yang semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu keanekaragaman produk perikanan siap saji atau siap masak merupakan trend permintaan masyarakat perkotaan. Brondong/Lamongan sebagai daerah tujuan wisata bahari jenis pemandangan alam yang menjadikan permintaan produk perikanan ikan segar dengan mutu yang baik untuk restoran juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang higienis, sehingga pada akhirnya akan mendukung perbaikan mutu produk yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Dimasa yang akan datang pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan serta tersedianya sarana pengolahan (*fish processing*) dan penyimpanan (*cold storage*) dalam kawasan pelabuhan perikanan sangat diperlukan karena menyangkut produk hasil perikanan yang akan dipasarkan.

Produk perikanan merupakan komoditi yang mempunyai sifat mudah mengalami penurunan mutu bahkan cepat rusak, maka penanganannya harus dilakukan segera mungkin untuk mempertahankan mutu ikan. Oleh karena itu kecepatan dalam pemasarannya akan sangat menentukan harga ikan.

Perbaikan sanitasi di areal kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong belum optimal. Hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan air bersih sehingga perlu diupayakan penambahan saran air bersih. Untuk keperluan pembersihan ikan di TPI bilaman sumber air tawar tidak mencukupi, diusahakan menggunakan air laut yang cukup bersih. Juga masyarakat pengguna pelabuhan perikanan perlu ditumbuhkan sikap kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan sehingga tidak memberikan kesan kekumuhan di dalam areal pelabuhan.

Prioritas yang perlu ditingkatkan yaitu perkembangan prasarana pasca panen. Hal ini dimaksudkan agar produk perikanan punya daya saing dan dapat meningkatkan mutu hasil perikanan tersebut serta akan berdampak pada pendapatan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

5. Tempat Pengumpulan Data Perikanan

Kegiatan pencatatan data perikanan pada pelabuhan perikanan ini sangatlah penting dalam pengendalian penangkapan ikan agar tidak melebihi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Diperlukan kerjasama/koordinasi antar berbagai pihak terutama semua unit usaha dalam lingkup kawasan pelabuhan perikanan, dalam memberikan data yang diperlukan serta koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan pencatatan data statistik perusahaan tangkap di pelabuhan perikanan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Untuk mendukung berjalannya Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), pencatatan dan statistik yang akurat dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami data-data di pelabuhan dapat menunjang operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Juga produksi ikan yang didaratkan dapat dimonitor sehingga tidak mengurangi volume produksi Indonesia. Sistem yang ada akan terkait langsung dengan pelelangan dan pencatatannya, dimana lelang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan

Selain sebagai tempat berlabuh dan pendaratan ikan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan tempat pertama pencatat kegiatan operasional kapal-kapal penangkap ikan. Selain itu pelabuhan perikanan sebagai tempat berkumpulnya nelayan, pedagang ikan, dan

pelaku ekonomi perikanan lainnya memungkinkan pelaksanaan berbagai penyuluhan dapat dilakukan secara efektif di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Pusat pengembangan masyarakat nelayan tidak terlepas dari masyarakat pesisir, seperti pedagang ikan, pengolah dan pelaku ekonomi perikanan lainnya. Hal ini diarahkan agar dapat menunjang kegiatan masyarakat nelayan yang berbasis Pelabuhan Perikanan tersebut.

Sulitnya akses ke sumber modal dan rendahnya ketrampilan dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi penangkapan yang lebih efisien serta kecilnya skala usaha pada sebagian nelayan tradisional, maka perlu diupayakan pengembangan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan penyuluhan. Mengingat pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan tempat yang paling sesuai dalam melaksanakan pengembangan masyarakat pesisir. Sehingga fasilitas yang mendukung mengemban masyarakat pesisir yang telah ada seperti Balai Pertemuan Nelayan (BPN) agar dapat dioptimalkan fungsinya.



Gambar 9. Pertemuan nelayan dengan *stake holder* di Balai Pertemuan Nelayan (BPN) PPN Brondong

7. Tempat Untuk Memperlancar Kegiatan Kapal-Kapal Perikanan

Kapal/perahu perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan membutuhkan bahan perbekalan seperti BBM (solar, minyak tanah), es, air tawar, bahan makanan dan lain-lain. Dengan adanya berbagai fasilitas fungsional seperti penyaluran bahan perbekalan seperti instalansi BBM, instalansi air tawar dan ketersediaan pabrik es, maka kapal-perahu akan memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam penyediaan bahan perbekalan PPN brondong juga dilengkapi dengan fasilitas perbengkelan dan perawatan kapal (*docking*) sehingga memperlancar kapal perikanan dalam melakukan perbaikan. Gambar 10 berikut ini adalah fasilitas bengkel yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.



Gambar 10. Bengkel yang ada di PPN Brondong

Untuk kebutuhan es, nelayan mendapatkan pasokan dari Perum PPS Cabang Brondong dan dari Unit Bisnis Perikanan Terpadu yang mengelola pabrik es PPN Brondong, serta unit usaha kecil di kawasan pelabuhan. Pabrik es yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada gambar 11. Sedangkan untuk air tawar dan solar juga dapat diperoleh dari Perum.



Gambar 11. Pabrik Es untuk memenuhi kebutuhan nelayan

Untuk garam, olie, dan bahan makan didapatkan dari unit usaha kecil. Selain itu bahan makan juga dapat diperoleh dari KUD Mina Tani yang melayani kebutuhan nelayan yang akan melaut.

Tabel 8 berikut ini merupakan penyaluran logistik operasional kapal untuk satu kali operasi (7 hari) berdasarkan jenis kapal:

Tabel 8. Penyaluran Logistik Kapal Per Trip

No	Logistik Kapal	Kapal <10 GT	Kapal 10-20 GT	Kapal 20-30 GT	Kapal 30-50 GT	Jumlah
1	Solar (liter)	600	1.200	1.200	2.000	6.000
2	Olie (liter)	10	20	30	30	110
3	Es (balok)	100	200	250	350	2190
4	Garam (kg)	50	150	250	300	750
5	Air Minum (galon)	2	5	8	10	25
6	Minyak Tanah (liter)	-	30	30	45	105
7	Air Tawar (Blong)	1	12	12	12	27
8	Bahan Makan	Lumsum	Lumsum	Lumsum	Lumsum	Lumsum

Sumber: PPN Brondong

Berdasarkan Tabel diatas, penyaluran logistic untuk pertrip kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Secara umum sudah terpenuhi dengan baik, namun disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terutama untuk memenuhi kebutuhan es dan solar. Hal ini dikarenakan kebutuhan es yang terus meningkat untuk perbekalan di laut serta untuk penanganan ikan setelah didaratkan.

Keuntungan lain yang diperoleh dengan adanya pelabuhan perikanan yaitu mengurangi biaya produksi karena tersedianya solar, air, es dan bahan perbekalan lainnya yang mudah diperoleh dengan jumlah yang cukup serta dengan harga yang terjangkau.

8. Pusat Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan

Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pusat pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan karena apabila sumberdaya ikan tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, maka kelestarian sumberdaya ikan akan terancam dan produksi perikanan dalam jangka panjang akan terus menurun.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagai basis pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan maka kegiatan pengawasan tersebut menyangkut pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan, hasil tangkapan ikan dan sebagainya. Fasilitas pos pelayanan terpadu sebagai pangkalan (basis) keberangkatan para pengawas di laut dan patrol penangkapan ikan dilaut perlu di fungsikan perannya terutama menyangkut konflik pelanggaran yang terjadi di laut.

Berdasarkan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

5.2.1 Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Pelabuhan harus dapat berfungsi dengan baik, yaitu dapat melindungi kapal yang berlabuh dan beraktivitas di dalam areal pelabuhan. Agar dapat

memenuhi fungsinya pelabuhan perlu di lengkapi dengan berbagai fasilitas baik fasilitas pokok maupun fasilitas fungsional (Murdiyanto, 2004).

Fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meliputi :

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas Pokok merupakan fasilitas fisik yang utama di pelabuhan perikanan, yang menjadikan suatu lokasi sebagai pelabuhan perikanan. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: Lahan, Dermaga, Pemecah Gelombang, Penahan Tanah, Groin, Kolam pelabuhan, Alur Pelayaran, dll. Fasilitas pokok yang di miliki oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9. Fasilitas pokok yang terdapat pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

No	Jenis Fasilitas	Luas
1	Areal Pelabuhan	2,588 Ha
2	Dermaga / jetty	161 m
3	Kolam Pelabuhan	23,4 Ha
4	Turap (Revetment)	2.139 m
5	Jalan Komplek	636,5 m
6	Breakwater	292 m

Sumber : PPN Brondong 2009

Untuk lebih lengkapnya, gambar fasilitas pokok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas Fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan, tanpa adanya fasilitas fungsional kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti bongkar-muat, operasi kapal-kapal nelayan, penanganan hasil tangkapan, tidak akan berjalan. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: Tempat Pelelangan Ikan, Los Bongkar,

Cold Storage, Pabrik Es, Dock / Slipway, dll. Fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Fasilitas Fungsional yang terdapat pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

No.	Fasilitas Fungsional	Nilai / Satuan
1	Gedung TPI	1080 m ²
2	Gudang Keranjang	100 m ²
3	Shelter Nelayan	100 m ²
4	Tangki air & instalasi	170 m ³
5	Tangki BBM	150 & 25 ton
6	Listrik dan Instalasi	345 KVA
7	Genset dan Instalasi	170 KVA
8	Tempat Penjualan BBM	36 m ²
9	Bengkel	120 m ²
10	BPN	125 m ²
11	Kantor Perum	200 m ²
12	Kantor Pelabuhan	384 m ²
13	MCK	60 m ²
14	Areal Parkir	800 m ²
15	Ruang Sortir Ikan	120 m ²
16	Ruang Navigasi di laut	2 buah
17	Ruang Navigasi di darat	2 buah
18	Rumah Genset	60 m ²
19	Pos Satpam	18 m ²
20	Tower Air	1 Unit
21	Radio SSB	2 Unit
22	Ruang Pengepakan Ikan	240 m ²
23	Pos Masuk	5 m ²
24	Los Pemindangan Ikan	180 m ²
25	Los Pemotongan Kepala Ikan	300 m ²
26	Refer Container	1 Unit
27	Pabrik Es balok	15 dan 50 ton / hari
28	Pabrik es Curai	(sementara tidak operasi)
29	Pompa sanitair	1 Unit
30	Gedung WASDI	1 Unit

Sumber : PPN Brondong 2009

Semua fasilitas fungsional yang ada dalam kondisi yang bagus dalam artian mampu melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pabrik es curai

sementara tidak beroperasi di karenakan kondisi peralatan rusak sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat nelayan.

Gambar fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada lampiran 3.

c. Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang merupakan fasilitas sekunder dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan perikanan. Fasilitas tersebut antara lain: Wisma Nelayan, Wisma Tamu, Garasi Alat Berat, Kios Nelayan, MCK, dll. Adapun fasilitas penunjang yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Fasilitas penunjang yang terdapat pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

No	Jenis Fasilitas Penunjang	Luas
1	Tempat Ibadah	100 m ²
2	Mess Operator	250 m ²
3	Kios / Warung	250 m ²
4	Pagar Keliliang	380 m ²
5	Rumah Kalabuh	120 m ²
6	Rumah Dinas	170 m ²

Sumber : PPN Brondong 2009

Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong disesuaikan dengan kebijakan yang mencoba mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas nelayan setempat.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, dan untuk meningkatkan pelayanan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nelayan maka kios dan warung telah dirapikan sesuai dengan tata aturan dan pengembangan pelabuhan.

Dari gambaran tentang sarana dan pra sarana PPN Brondong yang telah diuraikan diatas pembangunan sarana dan prasarana PPN Brondong masih memerlukan pengembangan baik itu perluasan areal / lahan pelabuhan maupun pembangunan sarana-sarana yang mendukung aktivitas nelayan seperti yang tercantum dalam site plan pengembangan PPN Brondong di lampiran 2.

5.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja bagi penduduk brondong dan sekitarnya. Adapun aktivitas yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja yang ada di pelabuhan perikanan nusantara brondong antara lain : pengepul ikan, pedagang ikan besar, kuli ikan (manol), pemilah ikan (pengorek), tukang becak, sopir truk pengangkut ikan.

Dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian dan data yang diambil dari kantor pelabuhan perikanan nusantara brondong jenis pekerjaan yang ada di Pelabuhan dapat dipaparkan seperti pada tabel 12.

Tabel 12. Jenis Pekerjaan yang ada di PPN Brondong

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Nelayan dan pegendong	13.776	90.40
2	Pengepul / Pedagang Ikan/Agen	219	1.44
3	Kuli Ikan (manol) & Pengorek	725	4.76
4	Tukang Becak	187	1,23
5	Lain-lain	332	2,18
	Total	15.239	100 %

Sumber: PPN Brondong

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan data dari administratur TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong penyerapan tenaga kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah 90,40 % sebagai Nelayan dan pegendong, bakul Ikan (pedagang ,pengepul dan agen) 1,44 %, Kuli ikan dan

pengorek 4,76 %, Tukang Becak 1,23 %, Lain-lain (sopir, pedagang makanan, dan tenaga kerja lain).

Nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap purse seine, payang, Gillnet, dan pancing. Sedangkan pegendong merupakan pedagang ikan yang ada di tengah laut, kegiatan ini terjadi karena adanya kebutuhan akan kapal pengangkut (carier boats) yang di dimanfaatkan oleh pedagang untuk transaksi jual beli ikan atau barter ikan dengan es di tengah laut.

Istilah pengorek atau pemilah ikan muncul karena kebutuhan nelayan untuk memilah ikan pada saat bongkar hasil tangkapan, dimana ikan hasil tangkapan di kelompokkan sesuai dengan jenis dan kualitas ikan sebelum di bawa ke TPI sehingga harga jual ikan akan bisa optimal. Tenaga pengorek atau pemilah ikan biasanya wanita dan anak-anak yang berasal dari penduduk Brondong dan sekitarnya, kebutuhan akan pemilah atau pengorek ikan tergantung pada besarnya kapal, untuk kapal ukuran < 10 GT biasanya tidak menggunakan tenaga pengorek walaupun menggunakan tenaga pengorek biasanya tidak lebih dari 10 Orang, untuk kapal ukuran 10-20 GT untuk sekali bongkar membutuhkan tenaga pengorek yang berkisar antara 13-20 orang, kapal ukuran 20-30 GT 20-25 orang tenaga pengorek, dan kapal ukuran diatas 30 GT membutuhkan tenaga pengorek sekitar 30 – 50 orang. Tiap kelompok pengorek biasanya dikoordinir oleh satu orang yang sudah dekat dengan juragan kapal dan masing – masing kelompok sudah terikat oleh perahu / kapal sehingga tiap kali kapal bongkar mereka sudah langsung bekerja. Sistem pengupahan yang di gunakan dalam mempekerjakan pengorek adalah sistem borongan dimana untuk masing – masing pengorek upah kotornya adalah Rp. 5 ribu di tambah dengan

upah jujur-ujur yang besarnya berkisar antara 15 ribu sampai dengan 25 ribu tergantung banyaknya ikan yang di pilih.

Kuli ikan merupakan pekerja yang bertugas untuk mengangkut hasil tangkapan. Ada dua jenis kuli ikan yaitu kuli ikan yang mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan ke TPI, kuli ikan jenis ini biasa di sebut “manol”, kuli ikan jenis ini biasanya berkelompok dimana tiap kelompok terdiri antara 6 sampai 11 orang dan sudah terikat dengan juragan kapal sedangkan jenis kuli ikan yang kedua adalah kuli ikan yang bekerja pada pedagang atau pengepul ikan, jenis kuli ikan ini hanya bekerja pada pedagang, dimana mereka hanya mengurus penyiapan peralatan, proses pengolahan ikan sampai packing sebelum di kirim keluar daerah atau ke luar dari areal pelabuhan sehingga kualitas ikan pada saat pengiriman sangat tergantung pada kuli ikan, Jumlah kuli ikan ini adalah berkisar antara 3 – 5 orang per pedagang. Sistem pengupahan pada manol adalah borongan untuk tiap 10 ton ikan untuk kuli ikan pertama upahnya adalah Rp. 300.000 dengan di tambah jujur-ujur (upah yang berbentuk ikan biasanya berkisar antara 50 kg – 1 kw), sedangkan upah untuk kuli kedua adalah Rp. 25.000 per 1 ton per orang.

Pekerja lain yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah Sopir Truk dan Colt terbuka yang biasanya mangkal di areal Pelabuhan, tarif untuk masing-masing angkutan tergantung pada jarak daerah pengiriman. Untuk pengiriman ke Surabaya, Gresik dan Sidoarjo tarif nya adalah Rp. 175 ribu untuk colt terbuka dan Rp. 250 ribu untuk truk, daerah pengiriman Pasuruan, Probolinggo dan Malang tarif pengiriman adalah Rp. 350 ribu untuk colt terbuka dan Rp. 500 ribu untuk truk, daerah pengiriman Banyuwangi adalah Rp. 500 ribu untuk colt dan Rp. 750 ribu untuk truck, Bali Rp. 750 ribu – 1 juta untuk colt dan 1 – 1,25 jt untuk truck, Pekalongan, Rembang dan Semarang Rp. 500 – 650 ribu

untuk colt dan Rp. 750 ribu sampai Rp. 1 juta untuk truck, Jawa Barat dan Jakarta Rp. 1 – 1,5 juta untuk colt dan Rp. 1,5 – 2 juta untuk truck. Selain sopir, pekerja yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah Tukang becak yang kebanyakan bersal dari daerah Tuban, pedagang makanan yang bekerja di areal lokasi kios Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Pedagang ikan atau pengepul yang ada umumnya berasal dari daerah Brondong dan Blimbing. Mayoritas dari pedagang atau pengepul ini adalah suplier perusahaan eksportir ikan sehingga mereka sangat membutuhkan kontiuitas dari produk, tak jarang pedagang ikan mendatangkan ikan dari luar daerah seperti Muncar, Prigi, Madura, Lombok Kepulauan, Sulawesi maupun Kalimantan.

5.3 Nilai Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Terhadap Pembangunan Perikanan di Kabupaten Lamongan

Aktivitas sehari-hari di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur, merupakan salah satu potret betapa besar kontribusi sektor perikanan dalam menggerakkan perekonomian warga di wilayah pesisir. Banyaknya orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan menangkap ikan menunjukkan bahwa, sektor perikanan memang perlu diperhatikan.

Untuk dapat melihat kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, maka digunakan suatu pendekatan Indeks Relatif Produksi yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 13. Kondisi Indeks Relatif Nilai Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Lamongan 2005-2009

Tahun	PPN Brondong		Kab. Lamongan		Nilai (I)	Fluktuasi
	Produksi (TON)	Nilai (Rp) (Juta)	Produksi (TON)	Nilai (Rp) (Juta)		
2005	65.294	351.973	39.295	229.885	1,09	-
2006	66.294	426.271	46.569	306.464	1,02	0,07
2007	72.454	512.172	60.769	421.184	0,98	0,04
2008	95.546	788.863	52.249	442.324	1,03	- 0,05
2009	109.878	972.694	57.198	495.413	0,98	0,05
Jumlah	409.466	3.051.973	216.785	1.665.385	5,1	0,11
Rata-rata					1,02	0,0275

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diolah

Berdasarkan hasil olahan data diatas dapat di ketahui bahwa rata-rata indek relatif produksi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah 1,02 dengan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,0275 % sehingga dapat di simpulkan secara umum kualitas pemasaran hasil perikanan khususnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif baik dan secara umum di Kabupaten Lamongan juga baik. Dari hasil analisa indeks relatif diatas juga dapat di simpulkan bahwa kualitas pemasaran hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong relatif lebih baik dari kualitas pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Lamongan yang secara otomatis akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di sekitar pelabuhan juga meningkat.

5.3.1 Pendapatan Masyarakat Nelayan

Pendapatan masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan ekonomi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat berdasarkan pada data empiris yang diambil melalui pengamatan dan wawancara. Adapun rincian pendapatan dapat dilihat berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pendapatan masyarakat dilihat berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, untuk melihat tingkat pendapatan nelayan asumsi yang di gunakan adalah pendapatan rata-rata pertahun dari nelayan juragan dan nelayan pandega. Dari hasil wawancara dengan 50 orang responden dengan komposisi 90 % Nelayan (45 orang terdiri dari 40 orang nelayan pandega atau buruh dan nelayan juragan), 1 orang pedagang, 2 orang kuli ikan, 1 orang tukang becak dan 1 orang pengolah ikan.

Pendapatan juragan ada 2 sumber pendapatan yaitu : (1) keuntungan melaut, dan (2) pendapatan dari kegiatan melaut lainnya. Pendapatan bersih total rata-rata juragan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selama tahun 2009 adalah Rp. 28,37 juta per tahun. Pendapatan total tersebut termasuk tambahan pendapatan untuk kegiatan pengolahan ikan dan kegiatan non perikanan seperti pengeringan ikan, pertanian maupun perdagangan yang masing-masing mencapai Rp. 4,83 Juta dan Rp. 2,76 Juta per tahun. Adanya pendapatan tambahan selain hasil melaut di lakukan oleh 47 % responden nelayan juragan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Rincian mengenai pendapatan nelayan juragan seperti di tunjukan pada table 14.

Tabel 14. Pendapatan Nelayan Juragan di PPN Brondong 2009

No	Sumber Pendapatan	Jumlah / Tahun (Rupiah)
1.	Kegiatan Melaut :	
	Penerimaan	63.170.000,-
	Penyusutan dan Perawatan	46.450.000,-
	Keuntungan	16.720.000,-
2.	Melaut Lainnya	4.060.000,-
	Total Pendapatan Melaut	20.780.000,-
3.	Pasca Panen	4.830.000,-
4.	Non Perikanan	2.760.000,-
Total Pendapatan		28.370.000,-

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan sejumlah responden

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa 77,97 % pendapatan nelayan juragan berasal dari hasil melaut atau Rp. 20,78 juta, pendapatan pasca panen

(pengolahan produk perikanan) sebesar 15,10 % atau Rp. 4,83 juta dan pendapatan non kegiatan perikanan sebesar 6,93 % atau Rp. 2,76 juta.

Pendapatan nelayan pandega dikelompokkan menjadi 4, yaitu : (1) pendapatan bagian hasil tangkap (merupakan besarnya pendapatan yang diterima atas dasar bagian hasil pandega menurut system bagi hasil tangkapan yang berlaku di juragan tempat pandega bekerja), (2) pendapatan ikan laukan dari hasil tangkapan (pendapatan yang di terima pandega yang berupa ikan untuk lauk pauk, biasanya besarnya tergantung hasil tangkapan), (3) pendapatan “campohan” yaitu pendapatan yang di terima pandega selain dari hasil melaut, seperti membantu proses bongkar hasil tangkapan dan perawatan kapal, (4) pendapatan ujur-ujur, yaitu pendapatan anggota kerabat pandega selain armada penangkapan yang berupa ikan hasil tangkapan yang di terima (biasanya ada 2 jenis ujur-ujur pasif dan ujur-ujur aktif). Rincian mengenai pendapatan pandega dapat dilihat pada table 15.

Tabel 15. Pendapatan Pandega di PPN Brondong tahun 2009

No	Sumber Pendapatan	Jumlah / Tahun (Rupiah)
1.	Kegiatan Melaut :	
	Bagian melaut	5.690.000,-
	Laukan	660.000,-
	Campohan	780.000,-
	Ujur-ujur	550.000,-
2	Total Pendapatan Melaut	7.680.000,-
3	Pasca Panen	320.000,-
	Non Perikanan	1.070.000,-
Total Pendapatan		9.070.000,-

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan sejumlah responden

Dari tabel 15 menunjukkan bahwa pendapatan nelayan pandega dari hasil melaut adalah 84,68 % dari total pendapatan atau Rp. 7,68 juta per tahun, pendapatan dari pengolahan hasil tangkapan (pasca panen) sebesar Rp. 320 ribu atau 3,53 % dari total pendapatan, pendapatan dari hasil nono perikanan

(perdagangan, dan pertanian) sebesar 1,07 juta per tahun atau 11,80 % dari total pendapatan. Nelayan pandega yang melakukan kegiatan non perikanan adalah sebesar 26 % dari total responden.

Perhitungan pendapatan nelayan diatas berdasarkan pada data primer yang diambil pada saat wawancara langsung dengan responden. Pendapatan diatas merupakan rata-rata pendapatan untuk seluruh nelayan yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Pendapatan manol dan kuli ikan terdiri dari 2 jenis, yaitu (1) upah kerja hasil pengangkutan dan (2) upah ujur-ujur, yang berupa ikan yang biasanya dijual langsung kepada pedagang ikan. Pendapatan kuli ikan relative stabil dibandingkan dengan pendapatan nelayan, hal ini dikarenakan kuli ikan dan manol senantiasa tidak tergantung oleh musim.

Pendapatan rata-rata manol pertahun adalah Rp. 11,2 juta dengan rincian untuk pendapatan ujur-ujur sebesar Rp. 4,14 juta per tahun atau 37 % dari total pendapatan, sedangkan pendapatan dari hasil pengangkutan hasil tangkapan sebesar Rp. 7,06 juta per tahun atau 63 % dari total pendapatan.

Pendapatan kuli ikan terdiri dari 2 jenis, yaitu (1) pendapatan hasil nguli yang merupakan pendapatan pokok, dan (2) uang makan dan campohan. Pendapatan total rata-rata per tahun dari kuli ikan adalah sebesar Rp. 10,8 juta dengan rincian pendapatan pokok sebesar Rp. 9 juta atau sebesar 83,3 % dari total rata-rata pendapatan per tahun, sedangkan pendapatan uang makan adalah sebesar 16,67 % dari total pendapatan atau sebesar Rp. 1,8 juta.

5.3.2 Pendapatan PPN Brondong

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dikerjakan PPN Brondong. Pendapatan tersebut berasal dari imbalan atas pemanfaatan barang maupun jasa yang ada di Pelabuhan, antara lain berasal

dari pas masuk sebesar Rp. 7.955.300,-, kebersihan dan jasa MCK sebesar Rp.3.035.800,-, sewa lahan, bangunan dan jasa parker kendaraan sebesar Rp.16.377.100,-, penjualan es sebesar Rp. 31.483.400,-, jasa esxavator, L300, Dum-truck sebesar Rp. 3.750.000,-, serta lain-lain (bengkel, sewa listrik, lelang dokumen, denda pekerjaan, dan biaya tambat) sebesar Rp. 55.545.513,-. Total Pendapatan bukan pajak pada tahun 2009 PPN Brondong sebesar Rp. 118.147.113,-, dari seluruh pemanfaatan sarana prasarana dan jasa pelabuhan. Sehingga apabila dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan dari pendapatan Negara bukan pajak tahun 2009 sebesar Rp. 52.000.000,- maka telah melampaui target pendapatan tahun 2009 sebesar Rp. 66.147.113,- atau sebesar 227,21 %. Untuk lebih jelasnya perincian dari masing-masing sub usaha tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 16. Pendapatan PPN Brondong Tahun 2009 dari Sektor Non Pajak

No.	Bulan	Sewa Lahan & Parkir (Rp.)	Pos Masuk (Rp.)	Kebersihan (Rp.)	Penj. Es (Rp.)	Jasa (Rp.)	Lain-lain (Rp.)
1	Januari	2.051.500	1.057.100	379.300	1.924.650	3.750.000	13.015.128
2	Februari	192.500	534.700	220.300	-	-	2.907.500
3	Maret	335.700	595.000	131.600	-	-	6.731.538
4	April	1.051.000	515.500	311.300	-	-	6.390.779
5	Mei	4.978.200	754.700	338.600	2.389.530	-	14.703.417
6	Juni	762.200	925.900	279.700	-	-	6.737.720
7	Juli	2.662.600	679.600	253.500	3.652.480	-	10.726.005
8	Agustus	1.232.400	474.300	212.100	1.763.580	-	8.650.156
9	September	607.400	638.100	224.800	4.114.890	-	9.488.414
10	Oktober	665.000	581.200	209.700	5.939.830	-	12.478.939
11	November	1.044.800	511.700	208.100	3.575.390	-	11.114.590
12	Desember	826.800	687.500	266.800	8.123.050	-	15.202.927
Jumlah		16.377.100	7.955.300	3.035.800	31.483.400	3.750.000	55.545.513
JUMLAH Rp. 118.147.113,-							

Sumber : Laporan Tahunan PPN Brondong 2009

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pendapatan PPN Brondong dari sector Non Pajak sebesar Rp. 118,147,113,- selama tahun 2009 yang otomatis memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Lamongan 2009 dengan pembagian 50% untuk kontribusi PAD Lamongan dan 50% untuk kegiatan

operasional PPN Brondong. Dalam hal ini pendapatan dari usaha lainnya (kerjasama, Investasi dan Usaha Lainnya) tidak dapat diakses dikarenakan laporan tahunan belum bias merilis karena melibatkan banyak instansi terkait yang mengelola PPN Brondong.

5.3.3 Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

Sehubungan kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan umumnya terpusat di daerah Pantai Utara Kabupaten Lamongan dimana segenap aktivitas ekonomi masyarakat bergerak pada bidang perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perikanan yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan, maka PPN Brondong merupakan salah satu barometer kemajuan pembangunan pada sector perikanan di Kabupaten Lamongan.

Peningkatan pendapatan nelayan yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan dengan fishing base-nya Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu sasaran pemerintah yang ingin dicapai. Adapun untuk melihat kontribusinya dapat menggunakan pendekatan metode *Location Quotient (LQ)*, yaitu sebagai berikut :

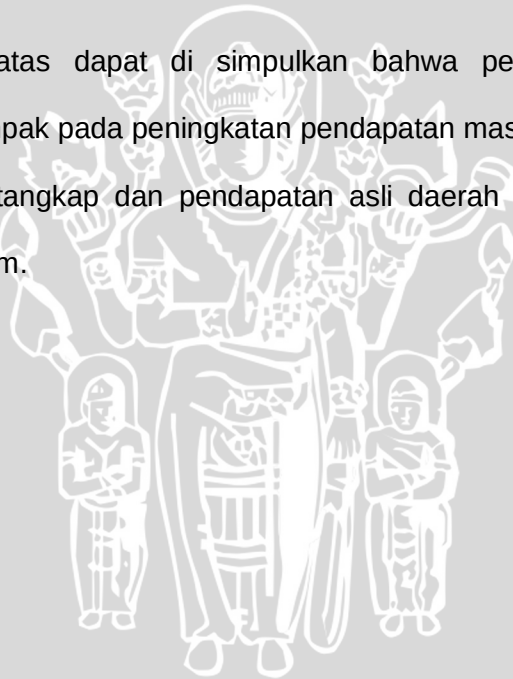
Tabel 17. Analisis Location Quotient (LQ) dengan indikator PDRB harga berlaku (dalam miliar rupiah)

No.	Tahun	vi	vt	Vi	Vt	LQ
1	2005	263.623	4.833.748	4.030.922	256.374.727	3,47
2	2006	271.776	4.447.439	4.155.590	271.257.674	3,99
3	2007	277.323	4.754.586	4.328.740	287.814.184	3,88
4	2008	312.076	5.035.834	4.598.167	304.798.966	4,11
5	2009	318.318	5.287.626	6.223.336	320.038.914	3,10
Rata-Rata						3,71

Sumber : BPS Lamongan & BPS Jatim diolah

Nilai LQ dari Sektor Perikanan Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 2005 – 2009 adalah 3,71 sehingga dapat di simpulkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Lamongan merupakan basis ekonomi masyarakat. Karena sektor perikanan di kabupaten Lamongan mampu melayani pasar untuk daerah itu sendiri maupun pasar luar daerah. Sehingga pengembangan sector perikanan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah Kabupaten Lamongan. Salah satu dari pusat kegiatan ekonomi perikanan Kabupaten Lamongan berada di PPN Brondong yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap produksi perikanan Kabupaten Lamongan khususnya produksi perikanan tangkap.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pembangunan PPN Brondong akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat perikanan khususnya perikanan tangkap dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan secara umum.



VI. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong mengenai Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER 06/MEN/2007 diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan yang berbasis Perikanan Tangkap.
2. Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dilihat dari implementasi fungsi pelabuhan perikanan yaitu telah dioperasionalkannya seluruh sumberdaya yang ada. Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong adalah:
 - a) Tempat tambat labuh kapal perikanan
 - b) Tempat pendaratan ikan
 - c) Tempat pemasaran dan distribusi ikan
 - d) Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
 - e) Tempat pengumpulan data tangkapan
 - f) Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
 - g) Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan
 - h) Pusat pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan.
3. Kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat dilihat dengan pendekatan Nilai Indeks Relatif PPN Brondong selama kurun waktu 2005-

2009 rata-rata pertahun yaitu sebesar 1,02 sehingga kualitas pemasaran hasil perikanan di PPN Brondong secara umum sangat baik. Selain itu juga dapat dilihat dengan perhitungan Location Quotion dengan nilai LQ rata-rata yang didapatkan sebesar 3,71 sehingga dapat di simpulkan bahwa sector perikanan merupakan basis ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka untuk pembangunan perikanan di Kabupaten Lamongan khususnya untuk meningkatkan peran dan fungsi PPN Brondong dalam pembangunan perikanan Kabupaten Lanongan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pantai, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.
2. Regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah Lamongan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan industri perikanan.
3. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dibutuhkan peran TPI agar proses penjualan ikan dilakukan melalui pelelangan.

Daftar Pustaka

- Anonymous, 2004. **Estimasi Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Alam Laut Indonesia**, Puslitbangkan ,Deptan, Jakarta. *dalam* Thamrin, M.H.2005.**Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur**, Skripsi.Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.Malang
- Arikunto, Suharmini. Dr. 2006. **Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)**. Edisi Revisi. Cetakan ke sepuluh. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar, Saifuddin, MA. 2007. **Metode Penelitian**. Pustaka Pelajaaar. Yogyakarta
- Dahuri, Rokhmin. 2002. **Perikanan Sebagai Sektor Andalan Nasional (Kebijakan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan)**. Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia. Jakarta
- Darwisito, S., *et all*. 2002. **Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Indonesia**. (*on line*) www.ipb.ac.id
- Diamark, S. 2000. **Kebijaksanaan Pengelolaan Kelautan**, SPL IPB.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2008. **Laporan Akhir Evaluasi Dampak Sosek Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**. Departemen Kelautan dan Perikanan. CV. Mitra Rekayasa. Brondong
- Djarwanto.P dan Subagyo.P, 1993. **Statistik Induktif**. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Effandi, S. 1994. **Administrasi Pelabuhan Perikanan**. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta
- Fauzi, A. 2005. **Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis, dan Gagasan**, PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Hamzah. 1990. **Psikologi Suatu Pengantar**. Erlangga Jakarta
- Kalolo, G. V. 1996. **Studi Tentang Operasional Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari Sulawesi Tenggara**. Universitas Hasanudin. Ujung Pandang. *dalam* Thamrin, M.H. 2005. **Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur**, Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang
- Kramadibrata, S. 1985. **Perencanaan Pelabuhan**, Ganeca Exact. Bandung
- Kusandi. 2002. **Konflik Sosial Nelayan**. LKIS. Jogjakarta
- Marzuki. 1993. **Metodologi Riset Fakultas Ekonomi**. Universitas Islam. Indonesia. Yogyakarta. *dalam* Wati, A.M.E. 2008. **Alternatif Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Akses Nelayan Terhadap Kredit Perbankan Di Sendang Biru**

Kabupaten Malang, Skripsi.Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang

Mubyarto, Hamid, Edy S. 1986. **Meningkatkan Efisiensi Nasional**. BPFE. Bandung

Murdiyanto, B. 2004. **Pelabuhan Perikanan Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal**, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.Bogor.

Nasution. 2007. **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**,Bumi Aksara.Jakarta.

Salim, A. 1994. **Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan**. PT. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta

Singarimbun, M dan Effendi, S.1989.**Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi)**. LP3ES.Jakarta.

Sjahrir. 1986. **Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok : Suatu Tinjauan Prospektif**. LP3ES. Jakarta.

Suharto, Edi. 2004. **Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep dan Strategi**. (on line). www.unlabandung.ac.id

Sukirno, Sadono. 1985. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. LPFE-UI. Jakarta.

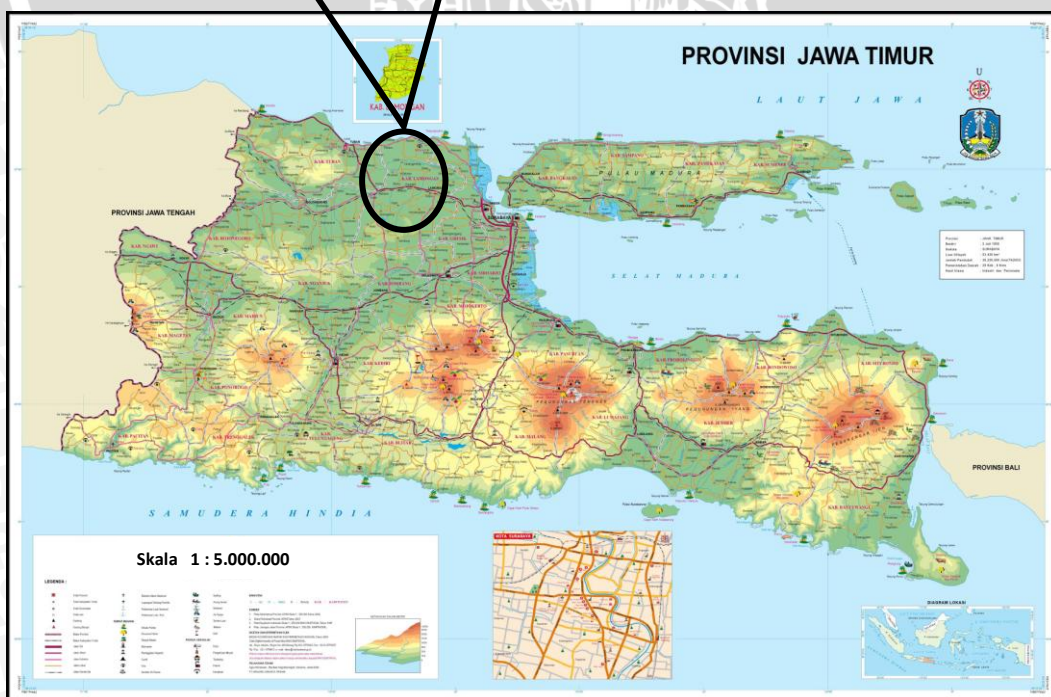
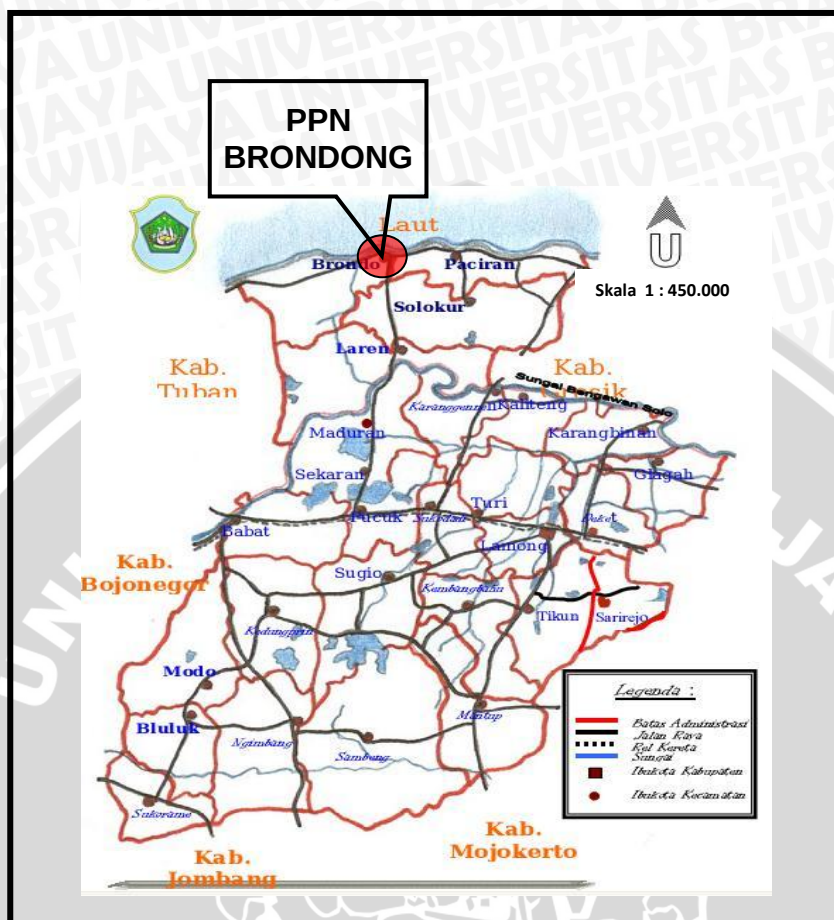
Sukmadinata, T. 1995. **Kajian kelembagaan dalam pemasaran hasil usaha penangkapan ikan di Jawa Timur**. Program Pasca Sarjana. IPB

Sumanto. 1995. **Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan**, Andi offset.Yogyakarta.

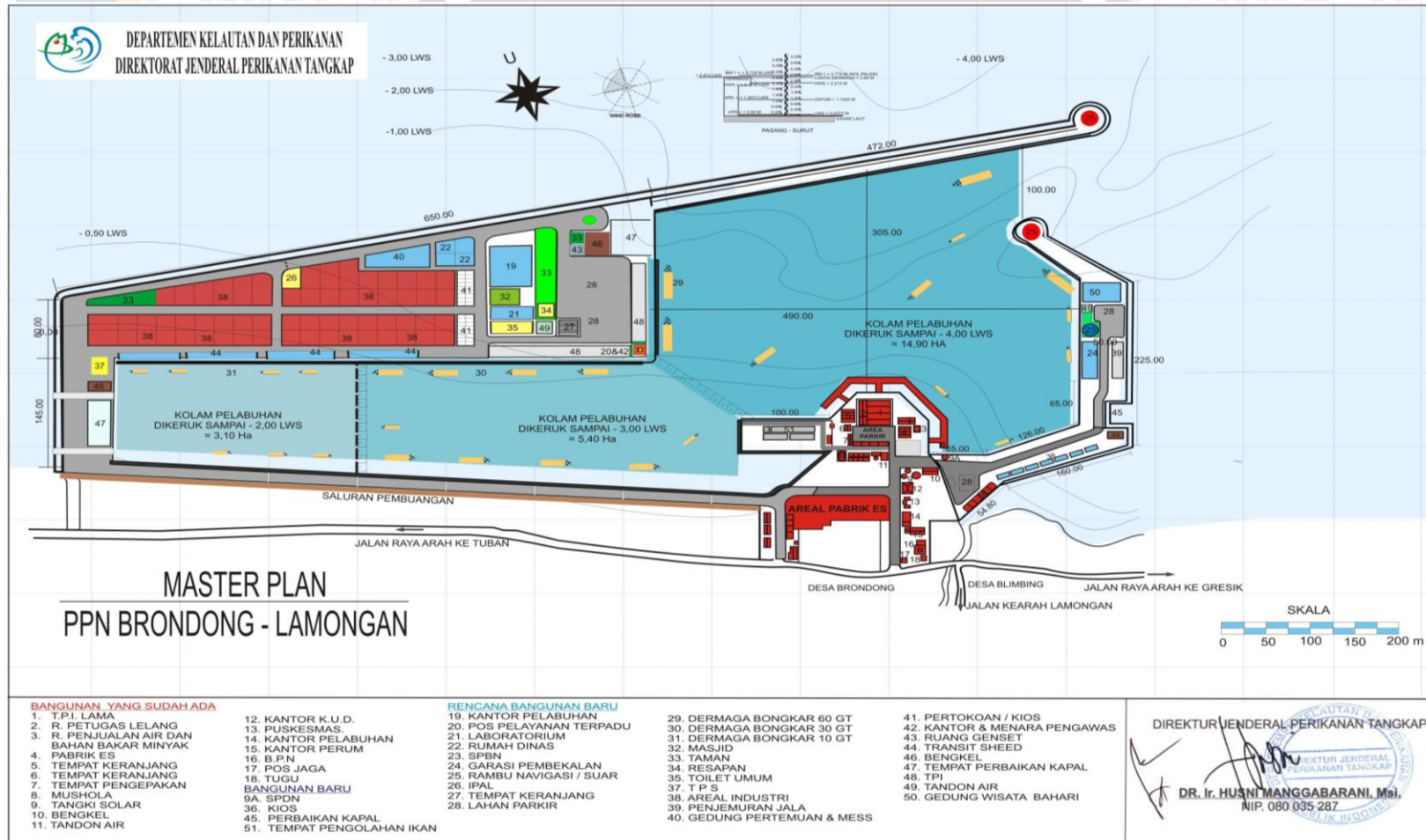
Thamrin, M.H. 2005. **Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur**. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang

Yin, R. K. 2002. **Study Kasus (Desain & Metode)**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Lampiran 1. Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



Lampiran 2. Gambar Masterplan PPN Brondong



(Sumber : Kantor PPN Brondong)

Lampiran 3. Foto Gedung, Sarana dan Prasarana yang ada di PPN Brondong



Gambar 1. Kantor PPN Brondong



Gambar 2. Kantor Pengawas Sumber Daya Ikan



Gambar 3. Kantor Perum PPS Brondong



Gambar 4. KUD Mina Tani Brondong



Gambar 5. Puskesmas Pembantu



Gambar 6. Kios IPTEK PPN Brondong



Gambar 7. Kantor JAMSOSTEK



Gambar 8. Pos Keamanan Perikanan Dan Kelautan Terpadu



Gambar 9. Rukun Nelayan Brondong



Gambar 10. Pabrik Es



Gambar 11. Kios Pedagang Peralatan Nelayan



Gambar 12. Kios Pedagang Es Batu Curai



Gambar 13. Solar Packed Dealer Nelayan



Gambar 14. Stasiun Pengisian Solar



Gambar 15. Tempat Pelelangan Ikan



Gambar 16. Kolam Labuh Kapal



Gambar 17. Dermaga kapal



Gambar 18. Kunjungan Kapal di PPN Brondong